



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI VI DPR RI
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN DIREKTUR UTAMA
PT PERTAMINA PERSERO BESERTA *SUBHOLDING***

| | | |
|------------------|---|--|
| Tahun Sidang | : | 2023-2024 |
| Masa Persidangan | : | V |
| Rapat Ke- | : | 15 (Lima belas) |
| Jenis Rapat | : | Rapat Dengar Pendapat |
| Sifat Rapat | : | Terbuka |
| Hari, Tanggal | : | Rabu, 12 Juni 2024 |
| Waktu | : | Pukul 10.38 s.d. 14.10 WIB |
| Tempat | : | Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta |
| Ketua Rapat | : | Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PDIP) |
| Acara | : | Pembahasan terkait: 1. Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 2. Lain-lain |
| Sekretaris Rapat | : | Dewi Resmini, S.E., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI) |
| Hadir | : | A. ANGGOTA DPR RI: 28 dari 55 orang Anggota dengan rincian: |

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDIP)**

8 dari 12 orang Anggota

1. Aria Bima
2. Adisatria Suryo Sulisto
3. ST. Ananta Wahana, S.H., M.H.
4. Sonny T. Danaparamita
5. Ir. Deddy Yevry Hanteru Sitorus, MA
6. Sondang Tiar Debora Tampubolon
7. Ir. Harris Turino, M.Si., S.H.
8. I Nyoman Parta, S.H.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-P.GOLKAR)

6 dari 8 orang Anggota

1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
2. I Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
3. Ir. H. Mohamad Idris Laena
4. H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M.

5. Doni Akbar, S.E., M.M.
6. Drs. H. Dadang S. Muchtar

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P.GERINDRA)

5 dari 8 orang Anggota

1. M. Husni, S.E., M.M.
2. Khilmi
3. Ir. H. La Tinro La Tunrung
4. M. Husein Fadlulloh, B.Bus, M.M., MBA.
5. Mulan Jameela

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P.NASDEM)

3 dari 6 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.
3. H. Subardi, S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

0 dari 6 orang Anggota

-

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

1 dari 5 orang Anggota

1. Muslim SHI., M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

2 dari 4 orang Anggota

1. Amin AK, M.M.
2. Hj. Nevi Zuairina

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. Dr. Jon Erizal, S.E., MBA.
2. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.
3. Hj. Intan Fauzi, S.h., LLM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 dari 2 orang Anggota

-

B. UNDANGAN:

1. Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) (Wiko Migantoro)
2. Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero)

- (Emma Sri Martini)
3. Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) (Alfian Nasution)
 4. Direktur PT Pertamina Gas Negara Tbk. (Arief S. Handoko)
 5. Direktur PT Pertamina International Shipping (Brilian Perdana)
 6. Direktur PT Pertamina New & Renewable Energy (Nelwin Aldriansyah)
 7. Direktur PT Pertamina Patra Niaga (Riva Siahaan)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo budhaya,
Salam kebajikan,

**Pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi VI DPR RI,
Wakil Direktur Utama PT Pertamina saudara Wiko Migantoro, beserta
Direksi *Holding*, beserta CEO *Subholding*,**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Taala*, Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Wakil direktur Utama PT Pertamina beserta Direksi *Holding*, beserta CEO *Subholding*-nya pada hari ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Bapak-Ibu dan hadirin yang saya muliakan,

Menurut laporan Sekretariat Komisi VI, rapat dengar pendapat hari ini telah dihadiri 6 fraksi, perkenankanlah dengan 6 fraksi ini, saya bisa membuka nanti pada saat mengambil keputusan, saya tetap menunggu kuorum kawan-kawan Anggota yang hari ini baru hadir 12.

Keinginan kita bagaimana kedaulatan energi, keinginan kita tercukupinya kebutuhan energi dan keterjangkauan harga energi untuk mengurus 270 juta rakyat Indonesia ini memang tidak mudah, dengan spektrum luasnya wilayah Indonesia, yang tentunya semuanya ini adalah banyak terkait tugas dari BUMN khususnya Pertamina, dengan itu dan dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, rapat saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.38 WIB)



(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Kami ingin mendapatkan persetujuan juga, kita jadwalkan juga maksimal jam 1 kita selesai, maksimal ya, syukur bisa kurang.

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Wakil Direktur Utama PT Pertamina beserta jajaran Direksi *Holding*, beserta CEO *Subholding* atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat dengar pendapat pada hari ini. Kami persilakan sebelum saya melanjutkan, kepada Wakil Direktur Utama PT Pertamina, Bapak Wiko Migantoro, untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan ketidakhadiran Bu Dirut Utama, waktu dan tempat kami persilakan.

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Terima kasih, Pimpinan.

Tentu kami menyampaikan permohonan maaf, Ibu Dirut tidak bisa hadir pada hari ini, dengan alasan yang telah disampaikan kepada Sekretariat Komisi VI, saya mendapat mandat untuk mewakili beliau.

KETUA RAPAT:

Kita setuju, kawan-kawan?

(RAPAT: SETUJU)

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya sesuai undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat pada hari ini untuk membahas hal-hal yang terkait evaluasi kerja korporasi tahun 2023 dan tentunya ada hal-hal yang memang perlu disampaikan dan membutuhkan dukungan politik Komisi VI, nanti kita akan bahas lebih lanjut.

Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan,

Sektor energi merupakan sektor yang sangat vital bagi perekonomian nasional, selain menjamin berjalannya seluruh aktivitas di semua sektor, sektor energi nasional merupakan salah satu penyumbang produk domestik bruto terbesar di Indonesia. Terkait dengan pentingnya sektor energi bagi kehidupan kita, ketahanan energi nasional selalu menjadi fokus perhatian terutama di Komisi VI. Ketahanan energi adalah isu besar yang terkait sumber daya alam yang tersirat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar '45.

Pengembangan sektor industri nasional khususnya terkait bahan bakar minyak dan gas juga dihadapkan pada beberapa tantangan, mulai dari tantangan distribusi, penjualan BBM bersubsidi, serta, serta implementasi program digitalisasi, investasi di sektor *green energy*, sampai dengan tantangan teknis, dan *safety* di kilang minyak.



Di samping pembahasan evaluasi kinerja Pertamina tahun 2023, tidak bisa dilepaskan dari efektivitas pembentukan *Holding* Pertamina, hingga saat ini terhadap bisnis migas, serta kinerja masing-masing *Sub Holding* , seperti PT Pertamina Hulu Energy, PT Pertamina Internasional Shipping, PT Pertamina Kilang Internasional, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Power Indonesia, PT Pertamina Gas Negara, sebagai korporasi yang fokus pada bisnis masing-masing, termasuk kendala yang dihadapi dalam meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan keuntungan.

Kinerja positif Pertamina tentu memiliki tantangan ke depan, seperti fluktuasi harga BBM, harga minyak dunia yang tidak stabil berdampak pada penyesuaian harga BBM bersubsidi, seperti pertalite dan solar, hal ini banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Pertamina berupaya menjaga ketahanan energi nasional, dengan meminimalisir, dampak gejolak harga global, tentunya akan berdampak hal-hal yang terkait dengan keuntungan korporasi. Juga terkait pelemahan harga dolar, kita melihat fluktuasi harga dolar yang jauh dari asumsi APBN kita, dalam rangka meminimalisir dampak gejolak ekonomi dan geopolitik dunia, tentunya imbas juga, antisipasi kalau sampai 50 hari berkebungnya Iran, kemudian terjadi serangan ke Israel, mungkin ya, ini akan berdampak pada hal-hal yang terkait harga minyak dunia. Ini penting, Pertamina melakukan, mungkin ya, peninjauan ulang terhadap biaya-biaya operasional belanja modal, pokok utang, dan bunga yang akan jatuh tempo, dengan rencana aspek korporasi.

Kita juga mengapresiasi untuk masalah transisi energi, bagaimana Pertamina didorong untuk beralih ke energi hijau, sejalan dengan komitmen global, untuk memerangi perubahan iklim.

Di media kita juga membaca akuisisi dan ekspansi, Pertamina baru saja mengakuisisi perusahaan asal Brazil untuk memperkuat bisnis Bioethanol. Ekspansi usaha ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi. Namun kita perlu cermat untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir risiko, kalau kita bicara pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari akuisisi-akuisisi yang pernah dilakukan Pertamina.

Tata kelola perusahaan yang baik, Pertamina berkomitmen, kita juga terus mengamati, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, GCG dengan menjunjung tinggi tentunya transparansi dan akuntabilitas, penerapan GCG yang baik penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan citra perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan rapat dengar pendapat kali ini, Komisi VI DPR RI ingin mendengarkan secara langsung perkembangan kinerja korporasi PT Pertamina dan *Subholding* -nya, tantangan apakah yang dihadapi, serta bagaimana strategi menghadapi tantangan tersebut, terutama kalau kita lihat kekhawatiran-kekhawatiran suku

bunga Amerika yang terus menaik, juga kondisi politik luar negeri Amerika, yang mungkin dalam pemilu nanti terjadi perubahan pemerintahan, dan juga tadi, kondisi Timur Tengah, dan satu hal lagi, krisis China yang kemungkinan saat ini mengalami berbagai persoalan, khususnya kondisi keuangan dan pasar di China.

Untuk itu, kami untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami akan mempersilakan kepada Wakil Direktur Utama Pertamina beserta *Subholding*-nya untuk menyampaikan paparannya, waktu dan tempat kami persilakan.

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Terima kasih, Pimpinan.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati,

Hari ini kami datang cukup lengkap, bersama Direktur *Holding* dan CEO Sub *Holding* atau yang mewakilinya, untuk menyampaikan materi sesuai dalam undangan.

Pertama-tama kami ingin menginfokan, bahwa hari Senin lalu, Pertamina baru saja menyelesaikan RUPS tahunan dan laporan buku kita telah diterima dan disahkan oleh pemegang saham, sehingga pada kesempatan yang baik kali ini juga, kami akan menyampaikan hasil-hasil di 2023, di samping nanti mendiskusikan bagaimana situasinya di 2024 ini, Pimpinan.

Kita mulai dari *slide* pertama, sebagaimana diketahui, disampaikan juga oleh Pimpinan *barusan*, bahwa posisi Pertamina ini sangat *unique*, di mana sebagai korporasi kita juga dituntut untuk mencapai kinerja-kinerja korporasi, antara lain kinerja keuangan, *bussiness growth*, dan juga kemampuan kita untuk terus berinvestasi, di samping itu juga kita memiliki tugas yang tak kalah pentingnya, yaitu menjaga ketahanan energi nasional.

Pertamina dewasa ini telah tumbuh sedemikian rupa, menjadi garda terdepan, dalam menjaga ketahanan energi nasional, di *slide* ini kami mendefinisikan ketahanan energi nasional itu di dalam empat kategori, yang pertama adalah *availability*, tahun 2023, kontribusi produksi minyak kita di hulu mencapai 69% dari produksi nasional, sementara produksi gas kita mencapai 34% dari produksi gas nasional, ini naik dibanding tahun sebelumnya, 2022, kontribusi minyak 68%, gas 32%.

Kemudian di sektor hilir, produksi BBM kita juga memenuhi 70% kebutuhan BBM nasional, di mana 100% diantaranya mampu mandiri memproduksi solar dan avtur, di bawahnya ada *highlight* mengenai aktivitas-aktivitas inti kita, yang kita lakukan baik di sektor hulu, maupun di sektor hilir, antara lain akuisisi PI Masela, ini sangat penting bagi Indonesia, karena

bersama dengan *partners*, kita pada akhir tahun lalu sudah mendapatkan PoD revisi, artinya kita sudah bisa mulai mengembangkan lapangan Masela.

Kluster kedua adalah kita, kami jadikan satu, ada *accessibility* dan *affordability*. *Accessibility* adalah keterkoneksi sumber-sumber energi itu dengan konsumen, *affordability* adalah mampu, keterjangkauan dari harga-harga energi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Di kluster ini, pada tahun 2023 jangkauan pasokan kita, *coverage*-nya sudah 98% dengan didukung oleh BBM 1 harga, *Pertashop* dan OVOO, ini di sektor penyaluran energi ya. Di samping itu, gas juga kita pada tahun 2023, total telah mencapai 820.000 sambungan rumah tangga, dengan tambahan 55.000 di antaranya didapat di 2023. Kami juga memiliki dukungan *suplly chain* yang lengkap, dengan operasional kapal, dimana Pertamina mengoperasikan 784 kapal *tanker* dan *support*.

Di bawah adalah *acceptability*, kita definisikan sebagai energi yang memang dituntut untuk mencapai *Net Zero Emission* 2060, lebih bersih lagi. Di mana pada tahun lalu, secara produksi, geothermal kita telah menghasilkan 1877 Megawatt, setara 78% nasional, dan PLTS dengan kapasitas 53 Megawatt. Kemudian produksi *biofuel*, untuk setiap varian BBM biodiesel, B35 dan HVO, bioethanol, E5 dan SAF kita kontribusikan di tahun lalu, juga aspek dekarbonisasi *scope* 1 dan 2 sebesar 8,5 juta ton CO2 ekuivalen, atau 30% emisi operasi. Di tahun lalu juga kami meng-*highlight*, ada *launching* produk Pertamina *Green 95* dan *Onstream* PLTS di Rokan, kemudian identifikasi potensi 7,3 Gigaton CCS/CCUS, dan yang terakhir adalah agregator bisnis karbon dan *pioneer*, ini sedang kita *develop*.

Di sebelah kanan merupakan apresiasi, Pertamina menempati ranking 141 dari *Fortune Global*, *Global 500* tahun 2023 dan satu-satunya perusahaan nasional yang tercatat di *Fortune Global 500*.

Izin ke halaman berikutnya, halaman-halaman ini mulai menjelaskan kinerja operasional kita di tahun 2023. Di sektor Hulu, produksi bertumbuh 8%, dari 967.000 *barrel oil* ekuivalen per hari, menjadi 1,044 juta *barrel oil* ekuivalen per hari, ini gas dan minyak tumbuh 8%, di mana kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, *growth* kita rata-rata adalah CAGR kita adalah 7% selama 10 tahun terakhir.

Hal ini dikontribusikan, ya, hal ini mengokohkan kontribusi Pertamina terhadap produksi nasional, tadi saya katakan, minyak 69%, gas 34%, dan yang lebih penting lagi di capaian, di 2023 untuk sektor hulu, kita memiliki parameter cadangan migas yang baik, kita mendapatkan *triple R*, *Replacement Reserve Rasio* 147%, artinya kita mampu mengganti cadangan yang diproduksi, dengan cadangan baru, dengan *rasio* 147% dan *Reserve to Production Rasio*, kita bisa *maintain* di atas 7 tahun, atau 7,4 tahun. Hal ini didukung oleh kegiatan-kegiatan kita di tahun lalu, di antaranya adalah jumlah sumur pengeboran *walk over*, *well service*, dan *well intervention*.

Menginjak ke sebelah kanan, ini kinerja dari Kilang, kami *highlight*, *volume intake* kilang meningkat mencapai 341 juta *barrel*, ini tertinggi sejak

berdirinya *Holding-Subholding*, atau meningkat 2%, juga *yield valuable product* kita naik 2% dibandingkan tahun lalu, dari 80%, menjadi 82%. Boleh kami sampaikan, kinerja ini didukung oleh selesainya 9 proyek utama dalam 5 tahun terakhir di kilang, antara lain di Cilacap ada Langit Biru, Revamp TPPI OSBL, penambahan tangki untuk menambah *productivity, Green Refinery* dari Cilacap, RDMP Balongan bertambah 25.000 *barrel oil per-day, barrel per-day*, kemudian ada *Ultra Low Sulphur*, juga *Onstream* Pipa Senipah Balikpapan, yang mana ini bisa menghemat pemakaian LPG di Kilang, sekaligus memonitorasi potensi *Upstream*.

Izin lanjut ke halaman berikutnya, di sini kami sampaikan, kinerja operasional dari pemasaran. *Volume sales* dari tahun lalu, 98 juta KL meningkat 2%, menjadi 100 juta KL, peningkatan *demand* ini kami dukung dengan kemampuan *supply* kita, ada dua faktor yang mendorong, yaitu program Pertamina *One Solution* untuk sektor industri dan *marine*, juga Program Subsidi Tepat, mendorong produk dan non, produk non PSO, retail, dan industri.

Di tengah, *Integrated Marine Logistic* atau IML, atau lebih dikenal dengan PIS, tahun lalu juga mencatat prestasi yang baik, di mana *volume* kargo yang diangkut meningkat 3%, dari 157 KL, menjadi 161 KL. Hal ini didukung oleh keberhasilan kita menambah armada kapal, juga ekspansi bisnis internasional, di mana saat ini kita memiliki 50 *rute* pelayaran internasional.

Di sektor gas, niaga gas juga meningkat, dari 327 BBTU menjadi 337 BBTU, meningkat 3% dibanding tahun lalu, hal ini didukung oleh mulai beroperasinya infrastruktur baru, pipa gas Senipah Balikpapan dan pipa Cisem yang kita operasikan, kemudian penambahan jaringan gas salur, saluran rumah tangga.

Di sebelah kanan adalah capaian dari *Sub Holding new renewable energy*, di mana produksi listrik, mayoritas berasal dari sumber daya energi bersih dari Geothermal gas dan *Power*, dan juga PLTS, meningkat 70, eh 17% dibanding 2022, faktor yang mendukung peningkatan ini adalah mulai berproduksinya Jawa 1, *Onstream* PLTS Rokan, konsistensi produksi di sektor geothermal, dan *equivalent available factor* yang lebih besar dari 97%.

Lanjut, berikutnya adalah capaian kinerja investasi Pertamina tahun 2023, terlihat bahwa investasi kita meningkat 35%, di mana Tahun 2022 kita berinvestasi 4,6 miliar dolar, 2023 kita meningkat 6,3 miliar dolar. Hal ini didukung oleh debiro, Program Debirokratisasi yang kita lakukan di *Holding-Subholding*, di mana Pertamina mulai akhir tahun 2022, awal tahun 2023, mulai mendelegasikan kewenangan *threshold* investasi, bisa dilakukan di *level Subholding* sampai nilai 500 juta dolar, artinya *Sub Holding* tidak perlu membawa proses *final investment decision*-nya ke *Holding*, dan ini sangat menolong, khususnya di *Upstream*, mengingat di, di *Upstream* itu banyak sekali FID hingga ratusan.

Kemudian ini juga didapat dengan kita melakukan *scrutiny* atau meningkatkan kualitas proposal, yang mana, ini juga akan menyingkat waktu proses persetujuan investasi.

Sebelah kanan, realisasi fisiknya, meningkat tahun 2022 hanya 94%, menjadi 99%.

Pada bagian bawah, kita lihat ada beberapa *project* yang *Onstream* di tahun 2023, baik di sektor hulu, ada enam *project*, kemudian di *C&T* gas dan KPI, serta *project* lainnya. Yang merubah situasi, saya dapat sebutkan Jambaran Tiung Biru ini sekarang menjadi *center* pasokan gas untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian proyek Sepinggian menjamin keberlanjutan *supply* gas untuk wilayah Kalimantan.

Izin lanjut, kami ingin menyampaikan juga ada program internal yang kita terus kembangkan, yaitu digitalisasi yang memang ini menjadi faktor sangat penting, sangat menentukan, di mana kita sudah mengembangkan sampai proses data analitik, dengan meng-*establish* suatu fungsi yang menama, yang namanya PIEDCC ya, selain bisa melakukan data analitik berdasarkan *feeding-feeding* yang infra, berdasarkan *feeding* yang diberikan dari infrastruktur IT kita, baik di *Subholding*, maupun *Holding*, kita juga akhirnya bisa mengambil keputusan secara cepat, karena data manajemen telah tersaji dengan cepat. Dukungan data analitik tersebut dapat dilihat di *cluster Upstream*, digitalisasi *production* optimisasi dan *integrated data management*, sekali lagi ini juga bisa mempercepat proses *FID* di *refinery* digitalisasi dan *monitoring* Kilang secara *online*, mulai dari *monitoring* minyak mentah, produksi, hingga *lifting product*, termasuk status kapal yang digunakan.

My Pertamina, juga sudah memiliki *super* aplikasi, *one step solution* untuk *client engagement*, dalam pembelian dan promosi *product*, kita juga punya Pertamina *call center* 135, melalui berbagai saluran komunikasi seperti suara, video, dan media social, ada juga SPBU digitalisasi, *fleet monitoring*, dan *digital procurement*.

Nah contoh *impact* yang bisa kami sampaikan pada hari ini untuk sektor digitalisasi, adalah program, Program Subsidi Tepat Guna, yang bisa menghemat hingga 3 juta KL produk BBM PSO, juga optimasi *spreading index* untuk optimalisasi stok BBM, LPG, khususnya saat manajemen di hari raya.

Lanjut, kami juga berkontribusi untuk capaian *sustainability* Pertamina, dalam menuju *roadmap Net Zero Emission*, di mana, di sini kita memiliki aspirasi *scope 1* dan *2 Net Zero Emission by 2060* atau lebih awal, kita memiliki tiga pilar di *scope 1* dan *2*, di *reduction*, kemudian *scope 3 reduction*, dan *scope 1* dan *2 Offset*. *Scope 1* dan *2 reduction* itu dari *on operation* kita melakukan dekarbonisasi, *energy efficiency*, *loss reduction* dan lain sebagainya, sementara di *low carbon business*, selain mempertahankan *legacy* di *geothermal business*, kita juga mengembangkan energi bersih di

solar, angin, juga memulai men-*develop carbon capture business* untuk *scope 1* dan *2 Offset*.

Capaian kita di tahun lalu, terjadi pengurangan 34%, atau 8,5 juta ton CO2 ekuivalen, reduksi emisi dari *scope 1* dan *2*, dan kita mendapatkan juga 32.7 juta ton CO2 ekuivalen reduksi dari produksi biofuel di tahun 2023. Atas pengelolaan ESG ini, tahun lalu Pertamina, mungkin Bapak-Ibu telah mendengar kita mendapat skor yang cukup baik, untuk industri *oil* dan gas terintegrasi, di mana skor kita mencapai 20.7 atau *medium risk*, dari sebelumnya ada di *high risk*, kita meningkat di *medium risk*, atau *ranking* pertama di subsektor industri *integrated oil* dan gas. Grafik di bawahnya menggambarkan posisi Pertamina dibanding dengan *major oil* lainnya, posisi kita ada di mana, yang terlihat bahwa kita sangat baik, ya.

Kami juga ingin menginformasikan bahwa tahun 2000, sampai tahun 2030, kami mem-*budget*-kan sekitar 15% untuk kegiatan dekarbonisasi dan *Net Zero Emission*. Halaman berikutnya, izin, akan disampaikan oleh Bu Emma, Direktur Keuangan Pertamina Persero, silakan, Bu Emma.

DIREKTUR KEUANGAN PERTAMINA (EMMA SRI MARTINI):

Terima kasih, Pak Wiko.

Izin, Bapak Pimpinan, melanjutkan terkait dengan penyampaian capaian kinerja Pertamina untuk tahun 2023. Sebagaimana tadi Bapak Pimpinan telah sangat tepat sekali menyampaikan, bahwa parameter utama terkait dengan kinerja 2023 itu sangat dipengaruhi oleh kondisi parameter global yang sangat tidak menentu. Kita lihat berbagai parameter global, melemahnya kurs rupiah, dan juga penurunan ICP sangat menentukan bagaimana Pertamina bisa *survive* di tengah kondisi yang sangat *uncertain*.

Namun demikian, kinerja operasional di tengah situasi parameter global yang sangat tidak menentu, Pertamina tetap bisa meningkatkan kinerja operasional, terlihat dari meningkatnya produksi migas, itu meningkat 8%, menjadi 1,44 juta *barrel oil per day*, kemudian juga *intake* Kilang tadi meningkat 2%, menjadi 341 juta *barrel per day*, kemudian juga *sales volume* juga meningkat 2%, menjadi 100 juta KL. Di tengah tadi, parameter kurs rupiah melemah 3%, dan juga penurunan ICP melemah 20%, namun terlihat bahwa pencapaian profitabilitas perusahaan meningkat 17%, jadi ini terlihat berbagai upaya dari peningkatan kinerja operasional, di tengah melemahnya berbagai parameter yang menjadi *revenue driver* kinerja Pertamina, kita tetap berhasil meningkatkan profitabilitas perusahaan sebesar 17%, di mana kita berhasil membukukan laba bersih meningkat dari tahun 2022 itu sebesar 3,81 miliar US Dollar menjadi 4,44 miliar US Dollar atau ekuivalen sebesar Rp62 triliun, ini untuk laba entitas induk, kalau laba total sebetulnya sekitar Rp72 triliun.

Jadi Pertamina tetap tumbuh dan meraih kinerja positif, di tengah situasi global yang serba *uncertain*, dan di tengah parameter ICP menurun, namun kinerja dan profitabilitas Pertamina tetap meningkat. Ini tentunya tidak

ditunjang oleh hanya kinerja operasional yang terus meningkat, namun juga terlihat bahwa efisiensi dan *reform operating model* kita itu telah membuahkan hasil, bahwa restrukturisasi operasional dan juga struktur organisasi pembentukan *Holding-Subholding* di Pertamina yang dilakukan secara menyeluruh, itu telah membuahkan hasil.

Dan terlihat di sebelah kanan, itu *cost optimisasi* itu telah membuahkan hasil, artinya restrukturisasi organisasi pembentukan *Holding-Subholding* itu membuahkan hasil efisiensi yang sangat nyata. Terlihat di sebelah kanan, bahwa dari kinerja operasional itu telah membuahkan kontribusi, efisiensi, dan juga terhadap kontribusi laba itu sebesar 64%, kemudian dari *cost optime*, ini efisiensi itu 25%, dan juga dari sisi mitigasi resiko atas mitigasi *forex* dan juga *liability management* itu sebesar 0,48 miliar, jadi ini berbagai upaya dan juga telah membuahkan hasil dari restrukturisasi organisasi.

Di halaman selanjutnya terlihat berbagai capaian-capaian angka kinerja keuangan dapat disampaikan, *revenue* memang mengalami penurunan, sebagaimana *ICP* menurun cukup tajam, tadi disampaikan di depan bahwa *ICP* menurun 20%, kalau tahun 2022 *ICP* di kisaran *weighted average price* di 97 US Dollar per barrel, di 2023 itu di level 78, jadi cukup dalam menurunnya dibandingkan 2022. Oleh karena itu *revenue* menurun 11%. Jadi terlihat meskipun *ICP* menurun 20%, namun di *level revenue* kita hanya terhantam 11% penurunan *revenue*-nya, jadi masih bisa ditahan di level 11%. Namun demikian, terlihat EBITDA malah menaik, kita cukup bisa menahan dan justru malah meningkatkan EBITDA di level 6%, di tengah tadi pelemahan rupiah dan juga penurunan *ICP* yang menjadi *key revenue driver* dari Pertamina Grup. Terlihat EBITDA meningkat menjadi 14,3 miliar US Dollar, dan juga dari sisi *bottom line, profit* itu meningkat 17% menjadi 4,4 miliar US Dollar.

Kemudian di sisi laporan keuangan, ini neraca, itu terlihat peningkatan total aset, itu bertumbuh 4%. Kemudian dari total *liabilitas* itu berkurang justru di tengah *capex* kita yang cukup agresif, dapat disampaikan tadi investasi *capex* kita itu, di tahun lalu itu, cukup agresif di 6,3 miliar US Dollar atau kurang lebih ekuivalen 100 triliun US Dollar, karena Pertamina itu harus tetap berinvestasi, baik itu di Hulu, kemudian di *refinery*, untuk *revamping* Kilang-Kilang kita yang sudah cukup tua, dan juga untuk aset-aset infrastruktur kita, untuk aset *integrity* kita, untuk merestrukturisasi aset-aset yang sudah lama untuk *maintenance*, kemudian terlihat juga dari peningkatan ekuitas itu meningkat cukup baik di level 11%.

Dari sisi laporan arus kas, ini juga terima kasih kepada dukungan Pemerintah, yang sudah, dan juga Bapak-Ibu semua di Komisi VI, yang sudah mendukung untuk mempercepat pembayaran dana kompensasi, ini tentunya sangat memperbaiki *cash flow* kita, untuk bisa membiayai *capex* kita, dan juga *working capital* kita, sehingga di posisi akhir tahun ini, arus kas operasi kita cukup sehat.

Kemudian dari arus kas investasi, ini memang kita dorong, kita tadi disampaikan *capex* di tahun 2023 ini cukup masif, itu sekitar 100 triliun kita

belanja *capex*, untuk *upstream* saja itu kurang lebih 5,7 miliar *US Dollar*. Kemudian untuk arus kas pendanaan, ini kita *fund raising*, baik itu melalui *global bonds* ataupun *corporate loan*.

Di sebelah kanan bawah, terlihat bahwa seluruh rasio-rasio keuangan, meskipun kita belanja *capex* cukup agresif, karena kita harus terus bertumbuh, dan juga di samping menjaga aset *integrity* kita di tengah aset-aset yang memang sudah semakin tua, dan harus dilakukan *maintenance* dengan *cost* yang cukup tinggi. Kita tetap bisa menjaga rasio-rasio keuangan di *level* yang cukup baik, baik itu dari sisi *debt to EBITDA*, malah cukup membaik, dan malah terjadi perbaikan di *level*, dibandingkan tahun 2022, di *level* 1,68 untuk *debt to EBITDA*, dan juga untuk *leverage ratio* itu cukup membaik dibandingkan tahun 2022. Ini tentunya didukung juga oleh percepatan dari dana kompensasi.

Tentunya untuk tahun 2024 ini juga mohon dukungan dari Bapak-Ibu Pimpinan Komisi VI untuk pembayaran dana kompensasi di tahun 2024 ini, mohon juga untuk tetap bisa dilakukan secara tepat waktu, sebagaimana dilakukan di tahun 2023, untuk tidak terjadinya penundaan pembayaran dana kompensasi, sebagaimana sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Kemudian di *rasio OCF to debt* juga ini mengalami perbaikan, karena di tahun 2023 ini sudah sangat baik, pembayaran dana kompen sudah terbayarkan hingga triwulan ketiga, jadi yang ke *carry over* ke tahun 2024 ini, hanya dana kompen yang kuartal 4 saja, yang. Dan itu pun sudah dibayarkan di Mei kemarin, jadi sudah lunas untuk seluruh dana kompen periode 2023, sudah lunas semua, jadi *Alhamdulillah* Mei kemarin sudah lunas untuk dana kompen periode 2023.

Kemudian untuk *debt to invested capital* juga sudah sangat baik, relatif terjaga baik, dan ini yang membuat kita *survive*, dan ini sebetulnya perbaikan fundamental yang terjadi di seluruh *Pertamina group*, di mana *level* efisiensi kita terjaga di *level* 9, di *level*, di bawah 90%. BOPO kita terjaga di *level* 90% di seluruh *Pertamina Grup*, jadi ini *rasio cost to revenue* kita, ini mencerminkan *level* efisiensi yang terjaga di *level* *Pertamina Grup*. Dan ini terjadi *level* terendah sepanjang *Pertamina* berdiri, dan ini terjadi setelah pasca restrukturisasi *Holding-Subholding*, setelah kita *slicing, restructuring*, dilihat *cost* persatuannya setelah, dilihat terbentuknya *Subholding*, jadi setelah di *slicing* seperti itu, kita bisa lihat *cost* persatuannya bisa di *benchmark* sesuai dengan *industry peers*-nya. Nah ini yang membuat berhasilnya restrukturisasi organisasi *Subholding* ini membuat lebih *lenient* dan lebih efisien. Bisa maju ke halaman selanjutnya.

Ini yang disampaikan di depan terkait dengan *cost optimization*, ini yang membuat kita *survive*. Tanpa dilakukan *cost optimization*, dengan peningkatan kinerja operasional saja, *Pertamina* tidak akan mampu *sustainable growth*. *Pertamina* tidak akan mampu bertumbuh secara *sustainable*, karena kinerja operasional itu hanya terkendala dan terukur *limit*-nya, apa, terbatas ya. Dengan adanya *cost optimization* ini, ini yang tadi menopang sebesar 1,1 miliar *US Dollar* dari total *profit* 4,4 tadi. Jadi

bayangkan, kalau itu di *carve out* dari total *profit*, Pertamina profitnya hanya 3,3, tidak lebih besar dari *profit* tahun sebelumnya di *level* 3,8. Jadi kalau tidak dilakukan *cost optimization*, tentunya *sustainable growth*-nya Pertamina tidak akan terjadi, dan oleh karena itu, inilah yang membuat Pertamina secara fundamental bisa tetap bertumbuh secara *sustainable*, ini yang membuat *reform operating model* kita dan *level* efisiensi yang harus terus dilakukan di Pertamina secara terintegrasi, dan menyeluruh, dan *continue* untuk terus dilakukan.

Kalau dilihat dari *cost optimization* ini ada tiga program, Bapak-Ibu, yang pertama, terkait dengan *cost avoidance*, jadi ini mitigasi yang kita lakukan secara menyeluruh di Pertamina Grup, terkait hal-hal apa yang akan berpotensi menimbulkan *cost*, ini yang kita lakukan.

Yang kedua adalah identifikasi hal-hal apa yang bisa berpotensi meningkatkan *revenue*, ini yang *reform operating model* terkait dengan *revenue growth*.

Yang ketiga adalah *cost saving*, ini yang juga berbagai program kita lakukan tanpa menghilangkan programnya, namun terus dilakukan dengan cara-cara yang lebih efisien, ini yang *cost saving* Jadi kalau dilihat, semua *Subholding* melakukan, dan ini dilakukan di seluruh *Subholding*, terlihat di Hulu, di Kilang, di pemasaran, di IML, gas dan PNRE, ini semua melakukan program *cost optime*. Dan kalau dilihat, di Hulu itu birunya lebih besar, di gas birunya lebih besar, dan di PNRE itu lebih besar, artinya, kalau birunya lebih besar, itu yang *revenue growth*-nya lebih besar, artinya di hulu, di gas, dan di PNRE, serta di Kilang, itu banyak inisiatif-inisiatif *reform operating model* yang meningkatkan *revenue*, *revenue growth activity* programnya banyak meningkatkan *revenue growth*, ini yang kita dorong terus untuk bisa *reform operating model*-nya karena tidak BAU, tidak *Bussiness As Usual*, tapi terus dilakukan inovasi-inovasi dari sisi *existing operating model* untuk bisa di *reform* dan menghasilkan *generate revenue* dan *revenue uplift* dari *existing* bisnis model yang ada.

Dan di bawah ini, disampaikan beberapa optimisasi yang sudah dilakukan, salah satunya adalah terkait dengan *crude* dan *product procurement optimization*, *upstream production cost optimization* dan lain sebagainya. Ini hal-hal ini yang akan terus dilakukan dan yang membuat Pertamina *survive* dan bisa bertumbuh secara *sustainable*, ini *granularity* dan program seperti ini yang akan kita terus lakukan.

Di halaman selanjutnya, dan mungkin ini akan menjadi *slide* terakhir barangkali dari kami, terkait dengan kontribusi Pertamina untuk Indonesia, terkait dengan kontribusi setoran kami kepada negara. Jadi ini yang, barangkali ini setoran, *trend* setoran kepada negara dari tahun 2020. Kalau dilihat dari tahun 2020, mungkin ini bagian dari *starting point*, tahun 2020 *pasca* Covid ini menjadi *new normal*, tahun 2020 *onward*, dan terlihat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2021 adalah restrukturisasi *Holding-Subholding* Pertamina, dan semenjak itu terlihat *trend* peningkatan kontribusi setoran Pertamina kepada Negara, dalam bentuk

berbagai setoran, apakah itu setoran pajak, setoran dividen, dan setoran PNBPN, dan juga *signature bonus*.

Setoran pajak memang selalu menjadi setoran terbesar, setoran PNBPN itu fluktuatif, karena itu sangat terpengaruh oleh *ICP*, terlihat dari *ICP*-nya membesar, pasti setoran PNBPN akan membesar juga. Kemudian setoran dividen itu sangat dipengaruhi oleh ketetapan RUPS. Nah, ini yang selalu terlihat bahwa, kita berkontribusi ke setoran pemerintah itu selalu, dalam 2 tahun terakhir ini, selalu di atas 300 triliun. Dengan kemarin, dengan koordinasi, dengan Kementerian BUMN, kita menyepakati bahwa untuk dividen Pertamina itu disepakati tidak terlalu besar, kenapa tidak terlalu besar? Karena *capex* Pertamina sangat besar. Jadi dipertahankan untuk *cash* kita di-*retain* di Pertamina, karena kemarin saja *capex* kita 100 triliun. Jadi kebijakan dari pemegang saham, untuk *cash*-nya di-*retain* di Pertamina, dengan *working capital* yang demikian besar kebutuhannya, jadi dividen diharapkan tidak terlalu besar, tapi tetap harus ada dividen, itu yang kebijakan dari pemegang saham, untuk bisa mempertahankan kondisi *cash flow* dan *liquidity* dan *serviceability risk* di Pertamina tetap terjaga baik.

Kemudian kontribusi yang lain dari Pertamina kepada negara adalah terkait dengan kontribusi terhadap penyerapan komponen dalam negeri BUMN nasional. Kalau dilihat, Pertamina itu hampir 50% berkontribusi terhadap komponen dalam negeri, yaitu me-*represent* 47%, senilai ekuivalen 373,9 triliun *IDR*, terkait dengan KDN BUMN, atau Komponen Dalam Negeri BUMN nasional, dan itu hampir terbesar, dibanding dengan BUMN-BUMN lain. Jadi ini *multiplier effect* dari penyerapan KDN terhadap ekonomi atau *GDP* dan tenaga kerja nasional, yang tentunya sangat berperan besar, dalam menggerakkan perekonomian nasional, dengan *value added GDP* senilai kurang lebih ekuivalen Rp702 triliun, dan juga bisa menggerakkan tenaga kerja kurang lebih 4,1 juta orang.

Demikian, kami kembalikan ke Pak Wiko, terima kasih.

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Demikian, Pimpinan, materi yang kami bawakan hari ini, mohon dapat, mendapat masukan lebih lanjut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bapak-Ibu dan Saudara sekalian,

Untuk rekap kehadiran rapat Komisi VI ini, telah ditandatangani dan telah hadir 16 Anggota, izin 12, maka kuorum rapat fraksi maupun anggota telah terpenuhi.

(RAPAT: SETUJU)



Terima kasih kami ucapkan kepada jajaran Direksi Pertamina yang telah menyampaikan penjelasan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para Anggota untuk memberikan tanggapan, maupun masukan, pendalaman terhadap penjelasan yang telah disampaikan oleh jajaran Direksi Pertamina pada hari ini. Tadi banyak hal telah disampaikan, terkait kinerja positif Pertamina tahun 2023, meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan, tadi dijelaskan, seperti fluktuasi harga minyak dunia dan transisi energi. Beberapa hal yang tadi saya cermati terkait dengan produksi dan penjualan ya, Pertamina mencatat peningkatan produksi, dengan juga penjualan BBM dan non BBM ya, yang mencapai 100 juta kilo liter, lebih tinggi dibanding tahun 2022, juga akuisisi terhadap beberapa blok, kemudian peningkatan laba telah diuraikan oleh Direksi Keuangan, *gambang* tadi, juga per-*Subholding* juga diuraikan satu-persatu.

Tentu kita harapkan peningkatan laba ini dapat dipakai banyak hal, Bu, termasuk investasi dalam pengembangan usaha, efisiensi dan inovasi, kita harapkan, tadi disampaikan, Pertamina terus-terus melakukan efisiensi, apalagi terkait dengan situasi keuangan global ya, untuk meningkatkan margin keuntungan, juga inovasi, pengembangan produk, dan layanan-layanan yang harus semakin maksimal, dan berkelanjutan, karena kadang saya lihat awal-awalnya itu gebrakan terkait dengan inovasi-inovasi pelayanan itu bagus, tapi kadang ada perubahan di tengah-tengah pelayanan tersebut, efisiensi dan inovasi penting untuk menjaga daya saing perusahaan.

Kemudian transisi energi ya, komitmen ini tentu tidak bisa tidak, terkait dengan energi hijau, ya energi hijau, dan terkait hal yang sekarang baru menjadi isu global pengembangan energi baru terbarukan ya, kami harapkan Pertamina terus meluncurkan berbagai *project* EBT ya, ini, ini menjadi komitmen, komitmen kita dan global untuk ikut terlibat memerangi hal yang terkait perubahan iklim dan membangun berbagai hal terkait dengan kebutuhan BBM untuk masa depan yang berkelanjutan.

Demikian yang bisa kita sampaikan. Kemudian pendalaman, dari sayap kanan Pak Subardi, Pak I Nyoman Parta, Mbak Wulan, Mas, Pak Harris, dan Pak Amin, sebelah kiri Pak Husni, Mbak atau Bu Nevi ya ini, Mbak *aja* lah, Mbak Nevi, Pak Muslim, Pak Deddy Sitorus, dan Pak Rudy Hartono. Kami persilakan untuk yang pertama, Eyang Bardi dari Nasdem.

F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Oke terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VI DPR RI,
Jajaran Direksi *Holding-Subholding* dari Pertamina, serta
Jajaran semuanya yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih atas
kehadirannya,**



Saya ingin, apa, melihat persoalan masyarakat yang kaitannya dengan, apa, langkah-langkah Pertamina, khususnya saya melihat bahwa saat ini, distribusi kebutuhan masyarakat tentang BBM dari produk-produk Pertamina *alhamdulillah* sudah bisa merata ya, sudah bisa terjangkau, dengan harga tentunya, harga sudah tidak seperti zaman dulu, sampai Papua dan sebagainya, ini adalah suatu langkah Pertamina yang betul-betul bisa dirasakan oleh rakyat.

Kemudian juga ada ide, ide-ide di akhir-akhir ini, ada ide dari Pertamina untuk bisa lebih apa, jangkauan distribusi itu menusuk kepada masyarakat terpencil ya, terutama, tidak hanya di luar Jawa, tapi juga di Jawa, adanya program *Petrashop* ya, yang di awal beberapa tahun yang lalu dimulai itu, marak sudah, cukup marak sekali. Nah, waktu itu kami punya asumsi, inilah yang namanya pemerataan, ya bisa terjangkau, dari tidak harus melalui satu proses panjang jalak, jarak panjang atau jarak jauh, tapi cukup dengan wilayah-wilayah kota kecil, wilayah pedesaan bisa menikmati.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Bardi *nyuwun sewu*.

F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Tapi di akhir-akhir ini dalam berjalannya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Bardi *nyuwun sewu*, mic-nya agak didekati.

ANGGOTA KOMISI VI DPR RI:

Kurang dekat Pak, kurang dekat, Pak.

F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Ya.

ANGGOTA KOMISI VI DPR RI:

Kurang keras, Pak.

F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Dalam perjalanannya, banyak *Petrashop* yang tidak beroperasi, mangkrak, mangkrak dalam arti, nutup, *gak* jual, dan sebagainya ya. Saya melihat itu bukan hanya sedikit, cukup banyak juga. Nah, saya ingin, melakukan pendalaman terhadap Pertamina, ini karena apa? Apakah pasokan, apakah memang analisis daripada jangkauan ataupun lokasinya salah ya, apakah memang masyarakat tidak terlalu mempunyai, apa,

memenuhi kebutuhan konsumsinya? Artinya, tidak, tidak dominan menggunakan BBM yang disediakan di *Petrashop* itu.

Nah karena dampaknya juga tidak hanya pada Pertamina, walaupun sebenarnya itu adalah modal dasarnya, asetnya daripada vendor-vendor atau para, para, apa *tuh*, konsum, apa namanya, para ini, *tenant-tenant* artinya rekan-rekan yang, yang distributor ataupun agen-agen yang *membikin Petrashop*, Pertamina hanya distribusi. Tetapi tentunya, itu merupakan tanggung jawab moral pada Pertamina, karena mereka rata-rata juga tidak menggunakan uang sendiri, dia dikasih skema oleh bank, dan dia harus *ngangsur*, dan sebagainya, ini sejauh mana sekarang.

Artinya yang saya ingin saya tanyakan adalah evaluasi secara global, secara total, efektivitas dengan ide gagasan *Petrashop* seperti apa, apakah itu layak dipertahankan, atau dikembangkan, apakah masih perlu dievaluasi? Nah, mohon nanti ada satu penjelasan secara detail, sejauh mana ini, langkah ini, sehingga apa, tujuan pemerataan disbu, distribusi bisa terlaksana, tanpa ada gangguan-gangguan yang mengorbankan masyarakat atau ekonomi masyarakat ya, garis besarnya itu, mungkin itu *aja*, menghemat waktu.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, sebelah kiri, Pak Husni.

F-P.GERINDRA (M. HUSNI. SE., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII dan teman-teman Komisi VI,

Semangat betul, Pak Ketua.

Dan teman-teman Komisi VI,

Yang saya hormati jajaran-jajaran Direktur, *Holding* Direksi daripada Pertamina,

Yang pertama tentunya, kami mengucapkan selamat untuk Pertamina atas keberadaan Komisaris Utama Pertamina yang baru, Bapak Simon Aloysius Mantiri, mudah-mudahan ini memberikan warna yang baru. *Ndaklah*, kita cuma mengucapkan selamat *aja*. Pak.

Tentunya pada kesempatan hari ini, kita mengapresiasi ya, kinerja daripada produktivitas, produksi Pertamina itu sendiri, maupun capaian-capaian keuntungan dan keuangan yang sangat baik dari Pertamina.

Namun ada satu sisi yang ingin saya pertanyakan, saya kemarin, Pak, waktu di Komisi VIII *tuh* kami debat masalah biaya Haji, salah satu komponennya adalah penerbangan. Dan saat itu kita ketahui bahwa harga avtur ya, harga avtur yang penggunaan sekali penerbangan lebih kurang 16 ton ya, saya kalau tidak salah, itu lebih mahal di dalam negeri dibandingkan Singapura maupun di Malaysia. Sedangkan di sini, di halaman kedua, apa yang Pak Wakil Direktur Utama sampaikan, bahwa produksi BBM 100% sudah mampu mandiri solar dan avtur. Jadi kalau kita sudah mampu mandiri, tentunya, negara Singapura yang tidak punya BBM sama sekali, *ndak* bisa dia menjual lebih murah daripada harga kita yang di dalam negeri.

Kemudian juga, masih banyaknya *nih*, Pak, masih banyaknya kapal-kapal pengangkut Pertamina, Pak, kencing di tengah laut, Pak, padahal di laut itu *enggak* ada toilet Pak, ya, ini hal-hal seperti ini, ini harus di, apa, pengawasan harus lebih kuat. Belum lagi ya, itu di jalur saya, dapil saya, Sumatra Utara, Pak, itu juga banyak tempat-tempat kencing mobil-mobil tangki, dan belum lagi Pak masih maraknya, penjualan-penjualan BBM bersubsidi ke daerah-daerah industri.

Kemudian ini, ini untuk Ibu, Mbak yang Direktur Keuangan ya, Bu, ya, ini BOPO, BOPO 2022, 2023 masih sama, di posisi 89, menurut kami itu masih tinggi itu, mestinya Pertamina masih boleh melakukan efisiensi-efisiensi untuk menurunkan *cost* maupun pembiayaan-pembiayaan, karena salah satu komponen yang memberikan tingkat keuntungan yang lebih baik untuk Pertamina itu sendiri, yaitu adalah penurunan-penurunan pembiayaan dan rasionalisasi-rasionalisasi tempat pembiayaan-pembiayaan tidak perlu kita keluarkan.

Satu hal lagi, tentunya, kemarin juga, kami, waktu kita rapat terakhir di tempat ini, dalam menyambut Idul Fitri, kami terus-terang memantau, melihat perkembangan yang dilakukan oleh pihak Pertamina itu sendiri, dalam melayani masyarakat yang ber-Idul Fitri ya, baik minus 7, maupun *plus* 10. Itu kita lihat, sudah sangat baik sekali, antriannya tidak panjang-panjang. Jadi kita yang bagus harus kita kasih tahu ya, yang baik ya, Pak, ya, itu sudah, sudah *anu* ya, masyarakat tentu sangat mengapresiasi kinerja Pertamina yang betul-betul melayani waktu musim Lebaran kemarin.

Saya rasa itu *aja* ya, Pak Ketua, dari saya, saya akhiri.

*Wabillahi taufik wal hiidayah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Selanjutnya, Pak I Nyoman Parta.



F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

**Pimpinan dan seluruh anggota dewan yang saya hormati,
Bapak-Ibu Dirut Utama dan Direktur, Dirut-Dirut yang mewakili seluruh
perusahaan Pertamina, *Holding* Pertamina,**

Ini Pak Harris di sebelah saya telah menyiapkan persoalan laporan keuangan dan rencana perusahaan, saya fokus bicara tentang persoalan kebijakan dan isu termutakhir, berkaitan dengan persoalan kinerja perusahaan Pertamina, khususnya berkait dengan persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat banyak.

Yang pertama, saya ingin menanyakan tentang tindak lanjut dari temuan Menteri Perdagangan ketika beliau melakukan inspeksi terhadap SPBE-SPBE, tentang pengisian gas melon, gas 3 kg, ditemukan di banyak tempat, 4 lokasi, isi dari gas melon itu mengalami, tidak sesuai dengan batas toleransinya, jadi isinya hanya 2,2, paling maksimal 2,8. Yang seperti ini, karena Pertamina yang memberikan izin terhadap agen SPBE agen, maupun pangkalan, sanksinya seperti apa ya? Saya tidak melihat respon dari Pertamina ketika Pak Menteri Perdagangan langsung menemukan kasus itu di lapangan. Sampai hari ini, saya belum membaca, sehingga saya harus bertanya dalam kesempatan ini, apa respon dari Pertamina, ketika menemukan SPBE yang tidak mengisi tabung subsidi gas 3 kg, isinya tidak sesuai dengan batas toleransi 3 kilo, itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin bertanya, kebetulan saya baca berita, bahwa ada pengangkatan Komisararis baru, Pak Simon Aloysius Mantiri, tadi kawan saya terdahulu sudah menyampaikan ucapan selamat. Saya ingin bertanya, setahu saya dari banyak, saya membaca profil beliau, beliau ini adalah pengurus aktif partai.

Dalam PP Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 55 ayat (1), bahwa BUMN dilarang untuk menjadi Direktur perusahaan ataupun Komisararis perusahaan, Pengawas perusahaan orang yang berasal masih aktif di partai, ini seperti apa Pertamina menyikapi ini? Ketika menerima seseorang menjadi Komut itu, tentang status yang bersangkutan, apakah sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2022? Tolong dibaca, mohon ada Staf Bapak_Ibu yang membaca itu, Pasal 55 ayat (1), jelas *kan?* Di situ ada larangan tentang orang menjadi Pimpinan, menjadi Komisararis dari Pertamina, dari BUMN, coba nanti saya ingin mendapatkan penjelasan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Informatif *aja*, Pak, karena ini wilayah operator, Kementerian BUMN ini. Informatif *aja* itu disampaikan, tapi responnya nanti dengan Kementerian BUMN.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Oh ya, *oke*, ya itu, Pak.



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dan bukan wilayah dia.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Itu satu, yang ketiga ini agak khusus. Izin, Pimpinan, selama saya menjadi anggota Komisi VI, sudah 4 tahun, 8 bulan, tiga kali Pimpinan cabang Bali Pertamina, khususnya Patra Niaga, saya kenal dengan Pak Deni Sukendar, dengan Pak Gusti Anggara, dan yang sekarang adalah Pak Endo, orang-orang muda yang sangat professional, tapi ketika menghadapi situasi Bali, dalam konteks tata kelola gas melon 3 kg, selalu mengalami kelabakan, utamanya adalah persoalan kuota untuk Bali, saya ingin menyampaikan data yang saya miliki.

Bapak-Ibu sekalian,

Tahun 2001, jadi ketika Covid, Bali mendapatkan jatah 218.293 Metrik ton pada saat Covid. Tetapi anehnya saat tahun 2024, ketika ekonomi tumbuh, Covid sudah tidak ada, UMKM bangkit, hotel, villa, kedai kopi tumbuh terbuka, kuotanya dikurangi, jadi kuotanya dikurangi, menjadi 215.488 Metrik ton, ini menurut saya, agak kurang, tidak baik, artinya bahkan ironis. Jadi ketika ekonomi tumbuh, justru *dikurangin*.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengusulkan tentang kuota rumah tangga, UMKM, nelayan prasejahtera, dan petani, itu sudah diusulkan dan Bali mendapatkan jatah kuota sebanyak itu. Namun kami ingin menyampaikan, setelah 4 tahun, 8 bulan ber-*counterpart* dengan Pertamina saya ingin menyampaikan, dan mohon nanti ini dijadikan bahan untuk menyelesaikan dan membuat kebijakan baru, khususnya berkaitan dengan persoalan gas 3 kg di Bali. Yang pertama Bapak-Ibu, di Bali, di luar penduduk Bali yang ber KTP Bali, ada saudara-saudara kita, saudara-saudara saya, saudara-saudara kami, yang hidup di Bali, tetapi ber KTP non Bali, jumlahnya bukan main, 1,2 juta. Saudara-saudara kita ini, sesungguhnya dalam rasio usulan adalah diusulkan di provinsinya masing-masing, tetapi yang bersangkutan menggunakan, memanfaatkan gas di Bali, karena memang aktivitas sehari-harinya di Bali, berjualan di Bali, bekerja di Bali, punya rumah kecil di Bali, tidak termasuk yang diusulkan oleh Pemerintah Bali, karena Pemerintah Bali mengusulkan berdasarkan KTP Bali. Nah, jadi, tidak mungkin orang, saudara-saudara kita ini dilarang mengambil gas di Bali, kami akan konflik, tidak mungkin itu. Jadi aktivitas berjalan seperti biasa, nah itu yang tidak dihitung dalam kuota, tetapi kuota itu termanfaatkan.

Selanjutnya adalah Bapak-Ibu, saya ingin menyampaikan, agar ada kebijakan baru, UMKM kita, misalnya yang jualan, jualan nasi itu sehari-hari menghabiskan 5 melon, 5 gas 3 kg, itu adalah kebutuhan satu rumah tangga dalam sebulan. Jika lima, lima, lima melon dihabiskan sehari, 30 hari, 1 bulan, berarti yang habis adalah 150 melon untuk satu dagang saja, untuk satu penjual saja, itu, jadi yang bersangkutan mengambil 30, untuk kebutuhan 30

keluarga, diambil oleh satu orang. Nah, ini harus ada solusi, mereka UMKM, tetapi mereka mengambil gas yang sangat banyak.

Selanjutnya adalah usaha yang berkembang sangat luar biasa pasca Covid, *loundry* dan binatu, *loundry* menghabiskan minimal 12, binatu menghabiskan sampai segitu sehari, gas melon ini. Kalau 12, 12 melon menghabiskan oleh satu binatu, dalam 1 bulan mereka membutuhkan 360 gas melon 3 kg, itu untuk kebutuhan 70 rumah tangga.

Dan yang terakhir adalah besarnya data gas yang dioplos. Ini yang harus Bapak-Ibu antisipasi. Saya sudah pernah berulang kali menyampaikan informasi ini ke pihak Pertamina, khususnya melalui Pak Tiyo, tentang lokasi-lokasi *oplosan*. Ada informasi yang, data masuk ke saya, sudah saya *flashdisk*, Bu, nanti saya serahkan, Pak Wakil Dirut, sudah saya *flashdisk*, saya serahkan. Nanti, 21 lokasi tempat oplosan. Kenapa oplosan laku di Bali? Karena usaha berkembang di Bali. Jadi, Pak, ketika saya tanya Pak Endo, *kok* seperti gelagapan, karena di tempat saya *enggak* ada oplosan, ya karena *enggak* ada yang beli, tapi di Bali banyak yang beli, banyak yang, oplos. Jadi gas 3 kg, dipindah ke 12, dipindah ke 50 itu, jadi, jadi dijualnya yang 50 ini dijual 700, harga komersialnya adalah 1 juta, 950 sampai 1 juta. Yang 12, dijual 150, harga komersialnya adalah 995 sampai 210. Jadi segitu, sehingga gas 3 kg untuk rakyatnya jadi habis, jadi habis.

Saya terus-terang, mohon maaf, melihat orang tua karena tidak punya motor, *nenteng* gas ke mana-mana, tidak menemukan, Bu, tidak, sedih sekali saya melihat kejadian itu. Oleh karena itu, ini harus ditindak, hari ini, 2 hari yang, 3 hari yang lalu sudah meledak satu tempat, korbannya 18 orang pekerja oplosannya, 3 sudah meninggal, kemungkinan, mohon maaf, semoga *aja* tidak, tetapi 11 orang lukanya lebih dari 80%, mereka bekerja di dalam, di luar dikunci, sehingga mereka dalam posisi luka, naik tembok, naik gudang.

Ini datanya jelas *banget*, ini gudang tidak seperti *outlet* agen, tidak ada ciri khas, karena agen resmi Pertamina itu *kan* ada ciri khasnya, maaf ini untuk teman-teman, seperti Indomaret dan Alfamart, ada kalau kita lihat, itu Alfamart, kalau ini Indomaret *gitu loh*. Di agen Pertamina juga sama, yang jual PSO yang 3 kg, warnanya begini, yang jual komersial warnanya begini, jadi jelas. Gudang ini tidak ada *outlet*-nya seperti itu.

Yang kedua, di gudang ini banyak mobil-mobil, tidak bertuliskan Pertamina atau agen gas. Agen-agen tidak ada di seluruh Bali, agen-agen maupun di luar Bali, tidak ada mempekerjakan orang banyak, sebanyak itu di agennya, kenapa? Karena memang tidak ada pekerjaan di agen. Gas ketika diambil di SPBE sudah langsung masuk pangkalan, *enggak* ada aktivitas menurunkan gas di agen, untuk apa ada 18 orang? Tidak ada 8 orang. Jadi orang itu karena bekerja dua *shift*, meledaknya jam 05.30 pagi, adakah pekerjaan normal, urusan gas dari agen jam 05.30 pagi? itu adalah tempat pengoplosan.

Dan secara syukur sekali, Staf Bapak, Pak Ahad Rahedi, *Region* Pertamina Jawa, Jawa, Bali, Nusra, sudah menyatakan, bahwa tempat itu bukan agen resmi Pertamina, sudah *clear*, itu adalah tempat pengoplosan.

Nah, lalu setelah pengoplosannya bagaimana? Saya sudah menyampaikan berita berulang-ulang tentang ini, informasi lokasi, sampai pelakunya, sampai orangnya, saya kirim kepada Pertamina. Tidak pernah ada tindak lanjut, di forum yang terhormat ini, agar tidak terus-terusan gas subsidi atas kebaikan negara ini, masuk ke tempat yang salah, salah sasaran, dioplos untuk kejahatan, bahkan juga orang yang tidak berhak, masa boleh-boleh menggunakan gas 3 kg, nenteng-nenteng gas 3, KTP-nya dari mana, itu terjadi, tidak ada pengawasan.

Pak Dirut, Pak Wakil Dirut,

Saya menunggu Bapak membawa Satgas Migas ke Bali. Mohon Bapak berjanji di tempat ini, bahwa pasti membawa tim itu ke Bali, agar kasus oplosan ini terbuka, karena sudah saking lamanya uang negara, dibuat menjadi urusan kejahatan. Mohon ini, Pak Dirut, Bapak bawa tim, Bapak bawa Satgas Migas ke Bali, saya kasih lokasinya. Kalau *toh* mereka hari ini barangkali tidak berproses, besok, lusa pasti berproses lagi.

Itu Pak Dirut, Pak Wakil Dirut dan seluruh Dirut Utama, Patra Niaga, terutama,

Bapak harus lakukan tindakan ini. Jangan biarkan, Bapak yang punya kewenangan mengelola barang negara ini, di lapangannya tidak, ternyata menyimpang pemanfaatannya, jangan dibiarkan.

Jadi tolong dengan sangat, ini, saya tunggu Bapak Wakil Dirut mengirimkan tim ke Bali, saya kasih Bapak lokasinya, karena ini *toh* juga sudah berulang-ulang disampaikan, minimal Bapak menemukan itu bekas pengoplosan, tolong. Pak. Bapak harus jawab di tempat ini, Bapak berjanji sama Pimpinan Komisi VI, sama kami, Bapak akan kirim tim ke Bali, untuk menuntaskan kasus ini. Minimal pernah terbuka, sudah berulang kali tertangkap, tapi tidak pernah terbuka. Kali ini begitu nyata, harusnya terbuka sekali ini, oleh karena itu butuh dorongan dari Bapak, dalam, sebagai pengelola barang negara dalam hal ini urusan gas. Kira-kira itu, Pak Bimo, apa boleh menyerahkan ...

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sebentar, Pak, ini karena penting juga terjadi di, kawan-kawan di dapilnya, saya minta langsung, izin ke kawan-kawan, untuk direspon langsung ke Pak Dirut, atau *Subholding*-nya apa ini? Patra Niaga ya? Mohon segera direspon Pak Wadirut atau ke Direktur Patra Niaga, kami persilakan.

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Baik Pak, terima kasih.



Kami menyambut baik, Pak, undangan untuk datang langsung ke lokasi di Bali, menindaklanjuti laporan Bapak tadi, ada 21 tempat oplosan. Adapun aksi-aksi kita yang telah kita lakukan di sana, untuk, apa, mencegah terjadinya oplosan ini, mungkin bisa dibantu Pak Riva dan Pak Alvian, silakan.

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Baik, terima kasih, izin untuk menjawab, Pak Ketua, Pimpinan.

**Yang kami hormati Bapak, Ibu Anggota Komisi VI DPR RI,
Pak Nyoman Parta yang kami hormati, terima kasih, Pak,**

Jadi prinsipnya, pertama-tama kami menyampaikan dan juga melaporkan bahwa aktifitas untuk bersama-sama melakukan pengawasan, baik dengan pemda dan juga dengan aparat, serta dengan Ditjen Migas, itu terus-menerus kami lakukan, Pak. Dan saat ini, kami telah melakukan sidak ke Horeka, jadi ke hotel, restoran dan juga ke wilayah-wilayah bisnis, di mana pada saat kami melakukan sidak tersebut, kami juga memberikan solusi kepada mereka jika ditemukan ada penggunaan gas LPG 3 kilo, itu dengan melakukan program penukaran dengan LPG-LPG yang non subsidi.

Namun kami menyampaikan kepada Pak Nyoman Parta dan juga kepada Pimpinan, serta Anggota Dewan Komisi VI DPR RI, kami akan meningkatkan koordinasi dan juga, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nyoman, kami akan bersama-sama dengan tim Satgas Migas, bersama Ditjen Migas dan juga tentunya pemda, kami akan meningkatkan dan juga melakukan sidak ke wilayah-wilayah, dan tentunya jika terkait dengan 21 titik yang tadi Bapak sampaikan, kami juga akan menyampaikan kepada Migas yang memang memiliki kewenangan pengawasan, Pak. Jadi terkait pengawasan dan juga koordinasi dengan APH, memang kami memiliki, tapi kami juga akan berkoordinasi dengan Migas untuk bisa sama-sama meningkatkan dan juga datang ke lokasi sesuai yang tadi Bapak sampaikan.

Terima kasih, Pak.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Izin, Pak Bimo, di luar urusan, Bapak akan membawa tim, terima kasih.

Saya usul untuk *merubah* dua kebijakan. Satu, peluang *ngoplosnya* ini *kan* ada dari agen langsung ke tempat pengoplosan, satu. Yang kedua, yang terbesar adalah diambil di pangkalan, kenapa di pangkalan? Karena ketika gas tidak habis di pangkalan, ada sisa, itu langsung diambil. Oleh karena itu, jangan gas itu lama-lama *nginap* di pangkalan, gas itu harus disebar lebih cepat, agar sampai ke konsumen, jadi pangkalannya harus diperluas. Kalau hari ini mereka mendapatkan jatah 100 sehari, dibuat menjadi 50, walaupun yang bersangkutan kembali, agar tidak mengurangi rezekinya, yang bersangkutan, tapi tempatnya diperbanyak, sehingga gas tidak perlu menginap, jadi kalau sudah gasnya menginap, apapun bisa terjadi setelah itu.



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Cukup itu.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Yang kedua, Pimpinan, nambah, agar Bapak memperbanyak gas 5,5 kilo, walaupun itu agak komersil. Kendala orang membeli di desa-desa, membeli gas yang 12 kg tu karena susah membawa, membawa, Mas Bimo, jadi *nenteng* itu minta ampun, Mas Bimo, 12 kg, baru gasnya saja, belum lagi tabungnya, kurang lebih itu 25 kilo keseluruhannya, *enggak* bisa Ibu rumah tangga, pakai sepeda motor membawa, sehingga yang laris adalah gas 3 kg, gampang ditenteng, nah saya lihat, ada peluang 5,5 kg itu juga gampang ditenteng.

Oleh karena itu buatlah tabung baru, berikan bila perlu secara gratis, masyarakat, agar mau menggunakan gas 5 kg ini, sehingga bisa lebih cepat sampai ke masyarakat, kita tidak terus-terusan urusannya,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Gas 3 kg, kira kita, jadi susah nyampai ke desa, menyebabkan orang rebutan gas 3 kg. Kalau yang 5,5 kilo ini diperbanyak tabungnya, itu sampai ke, ke desa-desa, saya pikir bisa terurai masalahnya ya. Dua itu, pangkalannya diperluas, perbanyak di setiap tempat, walaupun yang bersangkutan tetap menjadi pemiliknya, agar kita tidak merugikan hak mereka.

Yang kedua adalah buat gas tabung 5,5 kilo yang lebih banyak, nanti bila perlu diberikan secara gratis kepada masyarakat, seperti tabung 3 kg yang pernah diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Kira-kira itu, terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, terima kasih, ini penting, tidak hanya terjadi di Bali, Pak Wadirut, juga terjadi hampir di seluruh provinsi, tentang pengoplosan gas ini, terutama untuk kota-kota yang besar, seperti di, hampir di seluruh Jawa, maka kita masukkan dalam kesimpulan, untuk Pertamina memaksimalkan pengawasan dalam kaitan pengoplosan gas, bekerja sama dengan aparat-aparat terkait.

Saya kira, saya kira *gitu*, Pak, Pak Dirut.



WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Ya, menambahkan satu lagi, Pak, mengenai isu kelangkaan LPG di wilayah Bali, kami telah melakukan beberapa langkah, yang pertama adalah untuk *short term*, untuk kelangkaan LPG, Pak Nyoman, yaitu penambahan jangka pendek *extra dopping* di 3 kabupaten dan kota besar sebesar 98.720 tabung, ini sudah selesai.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tambahan ya, Pak, ya?

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Kemudian yang kedua, *extra doping* 1 Juni 2024, 1.470.840 tabung dan 17 Juni 2024, 264.880 tabung, total sudah 1,5 HK, sudah diselesaikan untuk yang *short term*, Pak.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Pak, saya tahu itu.

Saya mengikuti terus, mohon maaf, ini jadi agak berdebat kita.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Cukup dulu, Pak.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Tahun 2000, bulan Juni, Januari sampai 5 Juni 2023 itu, jumlah tabung, sampai tanggal 5 Juni ya, itu jumlah tabungnya adalah 32 juta 623, 32.623.333 tabung, itu yang disebar di masyarakat Bali. Selanjutnya Januari 2004 sampai 5 Juni 2024, ada penambahan 1 juta dari tahun yang lalu, Pak, saya tahu data ini, karena saya mengikuti terus.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, Pak.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Tetapi terjadi kelangkaannya sangat parah, ketika ditambah 1 juta, tetap juga terjadi kelangkaan, karena itu, Pak, persoalannya.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Dioplos.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Jadi *enggak* ada gunanya Bapak nambah, kalau akhirnya dioplos, *enggak* ada guna, Bapak mau tambah berapa kalau akhirnya dioplos.



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya kira.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Ga ada gunanya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Masalahnya sudah, Pak.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Gitu.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sudah kita minta untuk optimalisasi pengawasan.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Jadi Bapak harus awasi itu .

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kira-kira itu, Pak.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Mas Bimo ada tambahan sedikit tentang kesimpulan, kesimpulan tadi itu, satu yaitu, bagi yang melanggar ya, *kan* ini ada, ada pasti ada, ada sumbernya pelanggaran itu, itu perlu kena sanksi, sanksinya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Mungkin dikurangi kuotanya atau cabut izinnya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Kemudian yang kedua, yang, yang baik-baik ini diberikan *reward*, itu Mas, *makasih*.



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, jadi perlu keadilan, Pak Dirut Utama Pertamina Patra Niaga, yang 8 DO *enggak* usah tambah dulu, masih ada yang 1 DO, 2 DO. Bukan kemudian, sama-sama tambahan, yang 8 ditambahkan dengan kuota yang sama. Di, diimbangkan, Pak, karena mereka juga sama-sama punya utang bank.

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI / F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Ada reward and punishment.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Reward and punishment, kemudian kalau ada penambahan kuota, diimbangkan dulu. Mungkin dia lebih lama, betul. Tapi yang baru juga ditambahkan, karena yang 1 *enggak* nambah-nambah, yang 5 sudah sampai 8. Dan ini ada sesuatu kenapa nambah terus, kalau diteliti lebih lanjut, mohon perhatian, saya kira kita,

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Dan, dan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Cukupkan dulu mengenai gas 3 kiloan.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Dan biasa,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Selanjutnya,

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Dan,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya persilakan

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Dan biasanya yang oplos itu, yang banyak kuotanya, Mas.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, selanjutnya saya persilakan Ibu Nevi ya.

F-PKS (NEVI ZUAIRINA):

Ya, terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi yang kami hormati,
Para Direksi *Holding* dan *Subholding* bersama jajaran,**

Yang pertama blok koridor di Sumatera Selatan adalah lapangan gas terbesar kedua di Indonesia, produksinya migas mencapai 157.000 *barrel*, setara minyak per hari pada Triwulan 1 2024. Tahun 2023, Pertamina gagal, mengakuisisi, mengakuisisi, tapi Pertamina akan mengelola blok tersebut mulai 2026, dengan hak partisipasi hanya 30%. Bagaimana persiapan Pertamina untuk pengelolaan blok tersebut dalam 2 tahun ke depan? Apalagi blok ini kontraknya sangat panjang dengan Singapura, berapa lama kontrak penjualan gas ke Singapura, bagaimana keuntungan untuk rakyat Indonesia, dan bagaimana skema kontrak ke depan setelah kontrak ini berakhir? Itu yang pertama.

Yang kedua, Pertamina juga telah meluncurkan inovasi produk energi ramah lingkungan, seperti SAF, biosolar B35, dan *Pertamax Green*, tapi ternyata harganya tinggi, dan tentu ini tidak bisa dibeli oleh masyarakat. Kami menginginkan pada Pertamina agar adanya riset ya, agar harga ini bisa dinikmati secara layak oleh masyarakat, juga layak volume produksi, dan tentu kami juga menginginkan Pertamina, adanya langkah-langkah mengakselerasi Pertamina *Green* dan biosolar B35, termasuk juga distribusinya, stasiun pengisian *level* *Pertashopnya*, layak juga dilibatkan.

Yang ketiga, *Subholding* PNRE, ini ada kenaikan, Pak, untuk kita, apa namanya, peningkatan produksi di tahun 2022 sampai 2023. Artinya, adanya peningkatan permintaan konsumen terkait energi baru terbarukan ini terjadi, dan di daerah mana saja, Pak, di Indonesia? Dan apakah Pertamina punya *planning* daerah percontohan *EBT*? Perlu diingatkan, bahwa saat permintaan meningkat, maka *supply* juga harus terjaga, agar kepercayaan publik sebagai konsumen terpelihara, sehingga pengembangan energi baru terbarukan dapat meningkat.

Lalu, Pak, yang terakhir, baru-baru ini kita dengar Pemerintah ada mena, menargetkan meningkatkan produksi hingga 200.000 *barrel* minyak per hari di blok Rokan Riau, yang penuh dikelola oleh Pertamina. Ini *kan* kontradiktif, Pak, dengan rencana Pertamina yang justru ingin diturunkan, dari 2 juta *barrel* menjadi 1,4 juta *barrel*. Mohon penjelasannya, Pak.

Terima kasih, Pimpinan, itu saja.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Ibu Nevi.

Selanjutnya kami persilakan, terima kasih, Mbak Mulan, kopinya manis, kita apresiasi.

WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kok saya enggak dapet.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dapet, semanis, semanis yang memberi, kami persilakan, Mbak Mulan.

F-P.GERINDRA (MULAN JAMEELA, S.S):

Siap, Pak Aria Bima, terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang terhormat Pimpinan Komisi VI yang hadir saat ini ada Pak Aria Bima dan Pak Martin Manurung,
Bapak-Ibu anggota Komisi VI yang saya hormati,
Ada Bapak Wadirut, ada CEO dan seluruh jajaran *Subholding* Pertamina yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya,**

Baik, siang hari ini, saya ingin memberikan sorotan dua hal, dua poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama saya ingin mengapresiasi, atas kinerja Pertamina selama 2023 yang sudah dipaparkan tadi, dan mengingat semua, semuanya sudah meningkat, namun dalam keadaan situasi sekarang, mengingat *US dollar* ke rupiah itu juga meningkat, menjelang pemerintahan baru, kami harapkan, kondisi, saya ingin bertanya, apakah kondisi global dan dalam negeri itu, bisa diantisipasi oleh pihak Pertamina, terutama dalam hal energi subsidi, baik itu BBM bersubsidi ataupun LPG gas 3 kilo, apakah *supply*-nya aman?

Dan poin yang kedua adalah beberapa waktu lalu, terjadi kelangkaan LPG gas 3 kilo, di dapil kami, di Kabupaten Garut. Kelangkaan dan walaupun ada itu, terutama ya, terjadi di, di pelosok-pelosok *gitu* ya, pelosok-pelosok, seperti Pameungpeuk, yang memang jauh ke kota ya. Walaupun memang ada, gas LPG 3 kilonya, namun harganya mahal sekali. Nah sementara, sebentar lagi, dalam waktu beberapa hari ke depan, kita akan melaksanakan ibadah kurban, atau melaksanakan, merayakan Idul Adha, kita harapkan juga tidak, tidak terjadi hal seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Dan dikhawatirkan juga kelangkaan ini terjadi akibat dari, apa ya, penimbunan gas LPG *gitu*. Dan apakah para agen-agen yang sudah melakukan penimbunan itu mereka di, diberikan sanksi atau selama ini *tuh* diberikan sanksi apa *gitu loh*. Karena

sering banget terjadi di dapil kami, Garut Tasik ini, sering terjadi kelangkaan, dan harganya mahal. Bahkan sempat saya *denger*, sampai harganya 60.000, mahal *gitu* ya, dan, ya mudah-mudahan di Idul Adha mendatang, tidak terjadi kelangkaan, dan harga mahal untuk gas LPG 3 kilo.

Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hiidayah,
Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waaikumsalam,

Selanjutnya, kami persilakan Pak Muslim.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan teman-teman Anggota Komsu VI,
Pak Wadirut, Pak Wiko, beserta jajaran *Holding* Pertamina,**

Pertama, Pak Wiko, tentu kita mengapresiasi Pertamina dalam kaitannya ketahanan energi nasional, Pak Wiko. Namun ada beberapa hal yang ingin saya mendapatkan gambaran dari Pertamina. Kalau kita lihat di sini berkaitan dengan *availability*, berkaitan dengan kontribusi migas ya, baik pun kita lihat di minyak 69%, untuk kebutuhan nasional, kemudian gas 34%, kemudian produksi BBM juga ada 70%, kebutuhan BBM nasional dan 100% mampu mandiri, yaitu berkaitan dengan solar dan avtur.

Yang ingin saya tanyakan, Pak Wiko, kita tahu betul memang Pertamina ini *kan*, hampir waktu yang panjang ini *kan* kita sangat bergantung dengan impor. Apakah dengan kita lihat hari ini kontribusi migas, maupun BBM, ini *kan* sudah jauh lebih meningkat, dibandingkan kita lihat di tahun-tahun sebelumnya. Saya ingin dapat gambaran, ini masih sebesar apa *nih* keterkaitan kita, berkaitan dengan impor? Karena saya tahu betul ini Pertamina paling besar dalam konteks impor minyak ya, ini mungkin bisa diberikan gambaran.

Yang kedua, tentu apresiasi berkaitan dengan BBM satu harga, Pak Wiko. Kita tahu betul salah satu program pemerintah yang BBM 1 harga, memang ini sangat positif, dan saya lihat titiknya terus bertambah, biarpun sebagian besar kita lihat masih persoalan. Di beberapa daerah 3T ini juga harga itu mungkin berlipat-lipat, Pak Wiko. Tentu kita berharap juga BBM 1 harga ini menjadi prioritas utama juga, Pak, kenapa? Karena kita tahu betul banyak sekali persoalan-persoalan yang menjadi kendala di beberapa daerah yang khususnya berkaitan dengan daerah 3T ini. Kita ingin dapat gambaran

seperti apa *sih* sebenarnya kaitan BBM 1 harga, biarpun hari ini kita lihat masih cukup tinggi terhadap harga di beberapa titik ya.

Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut jargas ini, kebetulan ada Pak Dirut Jargas saya lihat di sini, itu sambungannya sekitar 820.000 SRT, sementara tambahannya hanya 55.000 Pak, Pak Arif ya. Kita berharap ini, seharusnya ini menjadi prioritas, Pak, kalau kita lihat 55.000 sampai kapan *nih* bisa dijangkau, Pak. Artinya harusnya ini menjadi prioritas, kenapa? Karena di beberapa negara ini *kan* jargas sudah cukup bagus Pak, kita berharap nanti Pak Arif ini juga, karena ini menyangkut dengan industri, khususnya kebutuhan rumah tangga, kita harapkan jargas ini juga bisa dijangkau sampai di daerah-daerah yang betul-betul dirasakan dampak positif oleh masyarakat.

Yang terakhir, tentu berkaitan dengan Bu Emma ini, Bu Emma *nih* ada beberapa hal yang masukan. Pertama, mungkin saya ingin dapat gambaran terakhir berkaitan dengan komitmen, khususnya Pertamina, terkait penyertaan modal, Bu, yang ada di KEK Arun, ini saya perlu tanya, karena sampai hari ini kan belum tuntas, Bu Emm. Jadi mudah-mudahan *nih*, bisa dijelaskan sama Bu Emma ini, berkaitan dengan penyertaan modal di KEK Arun yang sampai hari ini memang sudah dilaksanakan, tapi belum selesai *nih*, Bu Emma, ini mungkin bisa dijelaskan.

Kemudian buat Pertamina Perta Niaga *nih*, Pak Riva. Saya kebetulan beberapa hari yang lalu menerima teman-teman dari Kamar Dagang Industri, khususnya KADIN Aceh, ini berkaitan keluhan mereka terhadap, khususnya BBM industri di Pelabuhan Bebas Sabang, iya *kan*. Terus-terang, di sana itu juga harganya sangat tinggi, Pak, Pak Riva, itu sekitar 21.500 per liter, sementara di kawasan bebas Batam *tuh* hanya 11.600 per liter, ini ada perbandingan harga yang begitu besar. Jadi sehingga sangat menghambat dalam rangka khususnya berkaitan investasi oleh para-para pengusaha di daerah, sehingga ini menjadi problem tersendiri. Kita berharap ini paling *enggak nih* sama-sama wilayah kawasan bebas, baik pun BPKS Sabang, maupun di BP Batam, kita harapkan ini mudah-mudahan sudah ada solusi, sehingga sektor-sektor, khususnya para pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang industri ini bisa berjalan dengan baik. Jadi sehingga kita harapkan antara Batam dan Sabang ini juga bisa ada solusi untuk berkaitan dengan harga BBM ini, ini mungkin beberapa hal, Pimpinan, berkaitan dengan ...

Oh satu terakhir Pak Wi, Pak Wiko, ini juga banyak pertanyaan masyarakat, berkaitan dengan Mubadala Energi, yang sekarang ini sudah mulai melakukan eksplorasi minyak di Ace. Kita harapkan posisi Pertamina di mana, Pak? Kita berharapnya, apalagi Aceh ini *kan* sejarah perjalanan panjang, berkaitan dengan Pertamina, ini kita harapkan peran dari Pertamina juga ada di sini, jadi sehingga betul-betul ada keberpihakan kepada, khususnya masyarakat Aceh di sana, Pak.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Kami persilakan, Pak Harris Turino.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.T., S.H., M.Si., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VI,
Yang terhormat Pak Wadirut Pertamina beserta jajaran direksi *Holding*
dan *Subholding*,**

Pertama, saya harus jujur untuk memberikan satu apresiasi, terhadap kinerja operasional Pertamina, yang tadi dipaparkan, di seluruh lini bisnisnya, baik di *Holding* maupun *Subholding*, mengalami peningkatan. Saya akan coba *breakdown* satu persatu dari *Subholding* Hulu, naik 8% menjadi 1,044 *million barrel oil* ekuivalen per-day di 2023. Yang menjadi pertanyaan, target 2024 dan 2025 seperti apa, Pak? Apakah bisa pertumbuhan sebesar 8% atau lebih dicapai di tahun ini dan tahun depan?

Demikian pula, untuk *Subholding* Pengolahan dan Petrokimia, di Kilang naik 2% menjadi 333 juta *barrel*, ini targetnya di 2024 dan 2025 seperti apa? Kelihatannya kalau yang ini, pertumbuhannya sudah bisa diperkirakan, tidak akan terlalu besar ya.

Untuk di *Subholding* Pemasaran, tumbuh 2%, Pak, dan sudah mulai diluncurkan B35. Bagaimana dengan rencana B40 dan B50, kira-kira kapan akan direalisasikan? Karena ini urusannya dengan penghematan devisa yang luar biasa besar.

Untuk *Subholding* Gas, yang naik 3%, dan ada penambahan 55.000 jargas. Saya mendengar bahwa sudah mulai dilakukan percobaan secara masif di Karawang, perluasan, sementara untuk seluruh Jawa Barat kira-kira akan selesai kapan, Pak? Karena angka 850.000 ini masih jauh dari *coverage* untuk paling tidak di pulau-pulau atau provinsi-provinsi besar di Indonesia.

Untuk *Subholding International Marine Logistic* tumbuh hanya 3% menjadi 161 juta KL, menurut saya potensinya, untuk sekelas Pertamina yang masuk ke, di bawah 150 *top fortune five hundred*, ini sebenarnya peluangnya besar sekali untuk tumbuh lebih *gede*, Pak. Angka 161 juta KL, untuk perusahaan sekelas Pertamina, masih, *room* untuk pertumbuhannya masih sangat besar, sedangkan untuk *renewable energy* tumbuh 17%, ini dari sisi operasional.

Kemudian kalau dari sisi keuangan, ini, juga layak diapresiasi, Ibu. *Revenue*-nya turun 11%, tadi sudah dijelaskan, penyebab penurunan *revenue* adalah karena, penurunan *ICT*, sebesar 20%. Tapi Ibu mampu

mempertahankan penurunan *revenue* sebesar 11%, yang menarik adalah EBITDA-nya bisa naik 6%, dan bahkan *bottom line* nya di, naik 17%. Nah, hal ini mengakibatkan Ibu bisa tetap mempertahankan BOPO di 89%. Dan Ibu tadi bangga dengan BOPO di 89%. Yang ingin saya tanyakan, untuk perusahaan sejenis Pertamina, idealnya BOPO-nya di berapa *sih*, Bu, apakah 89, 89% sudah angka terbaik yang bisa dicapai oleh Pertamina, atau jangan-jangan, pemain lain punya angka yang jauh lebih kecil dari ini?

Satu contoh untuk di perbankkan, semua bank-bank Himbara, Mandiri BOPO-nya paling bagus, di level 50-an%, tetapi kompetitor kita, BCA, bisa di 44%, sehingga *there is still a big room to improve* ya, efisiensi tadi Bap, Ibu sudah lakukan, *cost optimization* di tiga hal, yaitu *cost avoidance* ya, *cost saving*, dan *revenue growth*. Yang menarik adalah di *revenue growth*, menghasilkan 568 juta dolar, dan di *cost saving* 574 juta dolar, ini angkanya relatif sama dan menurut saya ini juga layak untuk diapresiasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bentuk nyata dari *cost saving*, Bu, ya, bentuk nyatanya itu seperti apa? Dan targetnya di 2024 seperti apa, 2025 seperti apa? Jangan-jangan, inefisiensi memang besar-besaran terjadi di Pertamina selama ini, sehingga dengan sedikit aktifitas, bisa dilakukan *cost saving* yang besa. Bahkan sebenarnya, *cost avoidance*, ini juga yang besarnya hanya 106, ini mungkin bisa dicari lagi, Bu, karena kita tahu bahwa efisiensi *is a must*, bukan strategi, tetapi, mutlak dilakukan, apapun jenis organisasinya.

Berikutnya juga masih mengenai BOPO, Bu. Kita tahu bahwa BOPO adalah beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Kalau kita perhatikan, kondisi eksternal kan sangat tidak stabil, sehingga pendapatan operasional masih berpeluang untuk berfluktuasi, maka untuk mempertahankan BOPO, maka tidak ada jalan lain, memang *cost optimization* mutlak dilakukan oleh Pertamina.

Nah, mengenai dividen yang kecil, Bu, ya Ibu membayarkan dividen hanya 9 triliun ya. Tadi Ibu sudah jelaskan, alasannya adalah karena adanya kebutuhan investasi di 2023, yang sebesar 100 triliun, 6,4 *billion dollar*. Nah, di 2024, sekarang Ibu memberikan dividen yang kecil tentu, ada pikiran investasi di 2024, atau di 2025, sehingga *cash*-nya ditahan di Pertamina, jenis investasi apa yang akan dilakukan oleh Pertamina, dan berapa besarnya di tahun ini, dan estimasi di tahun depan? Karena kalau kita lihat, arus kas operasi Ibu yang sebesar sekarang 10,39 *billion dollars*, ini tercipta, boleh dikatakan, melulu, karena cepatnya pencairan dana kompen ya. Nah, sebenarnya *level* idealnya, tadi Ibu mengatakan, "Kita terima kasih, 2023 sudah lunas dibayar Mei 2024", ini memang tertunda 5 bulan, boleh dikatakan cukup bagus dibandingkan sebelumnya. Tetapi apakah ke depannya ini tidak bisa dibicarakan, agar lebih pendek lagi, sehingga, tentu, *cash*-nya akan lebih sehat di Pertamina.

Kemudian mengenai peristiwa yang terjadi di Bali, yaitu pengoplosan, saya rasa tidak ada yang istimewa dengan *bli* Parta ya, kecuali bahwa dia berani memperjuangkan ya, aspirasi yang ada di dapilnya, karena jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai, subsidi tidak tepat sasaran, dan ini merugikan negara. Itu yang sangat layak diapresiasi. Tetapi, bukan hanya

terjadi di Bali, saya yakin. Tadi Ketua sudah mengatakan, bahwa kejadian pengoplosan, kalau bisa terjadi di Bali, tentu bisa terjadi di kota-kota lain, karena ini *kan praktek* yang jelas-jelas sangat menguntungkan. Maka, Ketua, izin, saya juga minta, bahwa, ini dilakukan evaluasi keseluruhan di, bukan hanya di Bali. Apalagi tadi Ibu katakan, bahwa, sudah dilakukan digitalisasi, yang mampu membuat, subsidi tepat sasaran sebesar 3 juta kiloliter untuk BBM PSO, tentu digitalisasi ini juga bisa digunakan untuk urusan melon, sehingga ini, harapannya, Ketua, di lakukan untuk seluruh, paling tidak kota-kota besar di Indonesia.

Dan terakhir, bagaimana kinerja dua anak perusahaan Pertamina yang sudah *go public*, sejauh mana? Lebih bagus atau lebih buruk ya, dibandingkan dengan sebelumnya?

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Pak Deddy Sitorus, kami persilahkan

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Wiko, Wadirut Pertamina dan jajaran semua,

Terima kasih, selamat, apa *nih*, siang.

Yang pertama, saya yang global dulu, saya ingin pasti, yang mana ini, yang benar, angka *lifting* kita 2023, kalau dari satu sumber mengatakan 605,5 juta *barrel per day*, tapi ada laporan saya baca, laporan *Global Firepower* itu 845.000 *barrel*, mana yang benar? Itu satu hal.

Kemudian yang kedua, dengan impor sekitar 1 juta *barrel* per hari itu, itu *kan*, kita kehilangan cadangan devisa yang cukup besar, masalahnya *kan* memang kebutuhan tidak bisa di, diabaikan. Oleh karena itu, tentu, perlu kita diversifikasi, Pak, supaya jangan terus-terus matok di sana.

Dan kemudian saya kira Pertamina juga harus punya *grand strategi*, Pak, karena kalau menurut data statistik yang saya punya, dengan cadangan 3,6 miliar *barrel* itu, kita paling 18 tahunan lagi *nih* cadangan minyak. Oleh karena itu saya kira PPI betul-betul harus menjadi ujung tombak ke depan ini, supaya Pertamina tetap relevan, buat, buat kita *gitu*. Jadi ini mohon data-data ini bagaimana kita bisa dapat yang benar, apakah ada upaya untuk kemudian memacu sumur-sumur tua, atau cadangan baru, kayak apa *plan* ke depannya? Kami *pengen* tahu juga, kira-kira seperti itu.



Lalu yang kedua, kemarin *kan*, tahun lalu itu banyak *rame* soal BBM, harga BBM, dan sebagainya. Pertanyaan saya, sampai kapan Pertamina mampu bertahan dengan harga BBM yang ada sekarang? Bagaimana dengan rumor-rumor soal pertalite akan hilang, dan sebagainya? Ini *kan* menguap karena banyak persoalan di republik ini, kita *pengen* tahu yang jelas soal itu.

Kemudian yang ketiga, ini soal gas LPG, kalau teman-teman daerahnya semua aman lancar, saya kasihan sama orang-orang perbatasan, orang pedalaman, Bapak-Ibu, karena misalnya, Bapak-Ibu, mungkin sini semua sudah pernah bertugas *nih* sebagian besar di Kaltara sana. Tahu benar bahwa, daerah yang mendapat, menjadi daerah konversi itu hanya sedikit di Kaltar. Jadi pelanggaran di sana sangat banyak soal LPG 3 kg ini. Dari Pulau Nunukan itu diseberangkan ke daerah Kabudaya, Pak, bisa 75.000, gas melonnya, Pak. Itu *enggak* tanggung-tanggung, kalau ditanya ke pedalaman, kalau ditanya ke sana, ya, ini Pak, saya tanya ke Menteri SDM, "Waduh, belum masuk daerah konversi". Tapi minyak tanah pun *enggak* ada. Nah, kita *kan* *enggak* adil sama rakyat ini. Tolonglah bantu kami ke Kementerian ESDM, supaya di Kalimantan Utara itu, kuota untuk LPG 3 kg itu ditambah. Banyak sekali cadangan gas kita di sana, tapi rakyatnya *enggak* dapat apa-apa. Ini *kan* satu masalah yang menurut saya cukup menyakitkan *gitu*. Kalau bisa ditambah, Pak, daerah konversi di sana. Bayangkan, orang perbatasan *tuh*, beli gas LPG dari Malaysia, Pak, di mana wibawa negara kita ini? Bingung saya ya. Ini tolonglah, dulu pernah ada pembicaraan bagaimana kita kerja sama dengan Malaysia di seberang, supaya masuk ke Indonesia itu dengan barang Pertamina. Ini *kan* *dignity* sebagai bangsa, Bapak-bapak. Ini *kan* hutang kita sama orang Kaltara yang punya banyak cadangan gas, di Bunyu, di Nunukan, di Tanah Tidung, dan sebagainya itu, *kok* mereka *enggak* dapat apa-apa, minta jargas pun *enggak* dapat, Pak, hanya sedikit, ya Pak Oko ya. Mudah-mudahan kuota yang baru ini ditambah Pak, jargas di Tarakan dan Nunukan, Pak, ya.

Lalu kemudian, kembali ke, BBM *nih*, 3T, dulu saya bawa Pak Alvian ke sana, sebagai Dirut Patra Niaga, hasilnya bertambah beberapa daerah 3T, eh, mendapat BBM 3T. Ini saya mau undang *nih* Pak Reva, jalan-jalan juga kayak Pak Alvian ke Kalimantan Utara, ada daerah namanya Long Sule, Pak, 1 liter 80.000, Pak, *enggak* jerit kita? Mereka *enggak* bisa pergi ke ladang, mereka *enggak* bisa menangkap ikan, *gimana* *dong*, tolonglah kami, untuk menyelesaikan derita rakyat ini. Mereka beli itu untuk pergi ke Malinau, itu perlu 6 jam, Pak. Berapa yang bisa mereka bawa? Ini jeritan-jeritan rakyat di pedalaman ini, kapan lagi mau didengar, saya minta tolong Pak Reva ini, mohon perintahkan, Pak Wiko, saya mau bawa Pak Reva ke Kalimantan Utara, kalau dulu, Pak Alvian sudah menyelesaikan beberapa masalah di sana.

Nah yang keempat *nih*, saya mau tekankan lagi soal PPI, dengan cadangan minyak sedemikian itu. Kalau kita lihat datanya, itu *kan* pengguna, pengguna BBM kita itu yang terbesar itu *kan* transportasi. *Why not* PPI, PPI ini *invest* di sana, dengan semua truk logistik, bis, dan sebagainya, kenapa

enggak invest di sana? Kerja sama dengan operator angkutan, operator logistik, *kan* di sana masa depannya. Dengan sendirinya juga menurunkan beban di Pertamina, menurunkan beban di pemerintah, untuk subsidi dan sebagainya. Saya mendengar ada beberapa proyek strategis, bukan beberapa lah, satu lah contoh, yang di Rempang, itu yang dapat swasta, *solar cell* jual ke Singapura. *Loh*, kita *aja* masih kurang, target emisi kita belum kesampaian, malah bisa jual ke Malaysia, ini ceritanya *gimana*? Di mana Pertamina di sana, di mana PPI? *Kan* harus ada grand strategy, kalau menurut saya. *Otherwise*, *dihabisin* semua sama, sama swasta, luar lagi, walaupun ada *counterpart*-nya di, di Indonesi. Ini *kan roadmap* ke depan, jadi tolonglah dipikirkan itu dengan baik.

Sekarang ini kita dibanjiri dengan mobil listrik dari China, harganya sangat murah, ini *kan opportunity* juga buat PPI, *bikinlah* tempat *charge* di mana-mana, yang gampang di, dicapai orang, di tempat ada, di *mall*, di tempat-tempat perkantoran, *kan* ini duit juga. Jadi saya kira ini jangan di, dilewatkan, Pak. Kita mimpi besar, tapi hal-hal kecil, yang akumulatif, itu memberi keuntungan bagi Pertamina dan membangun bisnis ke depan, integritas ke depan. Ini saya kira harus diperhatikan, Pak, jangan sampai nanti Pertamina jadi penonton lagi *nih*, takutnya saya.

Nah, saya kira, saya hanya berharap, dengan semua kinerja keuangan dan solidaritas di dalam, saya kira, saya masih tetap akan menekankan satu hal, Pak, *corporate culture* di bawah, Pak, banyak *bottleneck* di sana. Tolonglah benar-benar kita seriusi ini, karena ini perusahaan yang sangat vital untuk negara dan rakyat, harus ada satu *corporate culture* yang kuat, di *level middle management* sama *below* itu, kalau *enggak*, susah, Pak.

Saya tahu apa yang Bapak-bapak, Ibu semua hadapi, makanya wajahnya *enggak* ada yang bersinar-sinar *nih*, kecuali Bu Emma, yang lain *udah* mulai megang kepala itu tengok, Pak, Pak Arif itu, *udah sutris* dia, dalam masa transisi ini pasti tekanan dan beban *tuh* banyak, ya tapi Komisi VI ada di belakang Bapak-Ibu, kalau benar. Kami tahu semua apa yang terjadi di dalam, tapi, sepanjang untuk bangsa dan negara, saya kira kita akan jaga Pak, ya, *enggak* bisa main-main *nih*, karena Pertamina itu salah satu tiang dari negara ini, kalau kita mau jujur, *enggak* bisa main-main ya. Jadi saya berharap, benar-benar kita jaga, untuk kepentingan semua.

Saya kira itu, terima kasih, *makasih*, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Deddy Sitorus.

Pak Amin.

F-PKS (AMIN, Ak., M.M.):

Makasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI yang saya hormati, Wadirut Pertamina, Pak Wiko, dan semua jajaran, yang tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada *panjenengan* semua, *enggak* bisa saya sebutkan satu-persatu,

Sebelum saya menyampaikan pandangan, saya bertanya sama Bu Emma, jadi hari ini *enggak* ada piutang dana kompensasi subsidi ke pemerintah, Bu, ya, dari Pertamina?

DIREKTUR KEUANGAN PERTAMINA (EMMA SRI MARTINI):

Untuk tahun 2023 sudah lunas, Pak.

F-PKS (AMIN, Ak., M.M.):

Sudah selesai ya?

DIREKTUR KEUANGAN PERTAMINA (EMMA SRI MARTINI):

Ya.

F-PKS (AMIN, Ak., M.M.):

Baik, *makasih*.

Pertama, sebagaimana beberapa teman tadi menyampaikan apresiasi, tentu kami juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Pertamina. Ya, kalau tadi Pak Harris, Pak Dedi begitu lengkap, saya cuma *nyoroti* dari kinerja keuangan dari, apa namanya, yang paling kiri sampai paling kanannya, ringkas saja, di tengah *revenue* yang menurun 11% *gitu* ya, tapi NPHT-nya bisa naik 17%. Tentu di dalamnya banyak variabel yang dilakukan, banyak kerja-kerja besar yang dilakukan, antara lain misal tadi disebutkan *cost optimization* dan sebagainya, ini tentu sebuah prestasi. Walaupun tentu, kita *tetep* berharap, ya sebagaimana ditanyakan teman, kami apakah ini sudah ideal, tentu kita berharap ada yang lebih ideal dari ini, namanya juga harapan, Bu.

Dan tentu, kita apresiasi juga karena, perusahaan besar Pertamina juga, kalau saya baca datanya BPK, dari 2014 sampai 2022, itu menjadi penyumbang deviden terbesar kedua ya, setelah BRI. Saya *enggak* tahu ini datanya benar atau *enggak*, karena saya baca dari media saja, itu juga saya kasih apresiasi, walaupun tahun 2023 karena alasan tadi yang disampaikan Bu Emma ya, setornya cuma 9T padahal labanya 71T, berarti cuma 12,5% ya, setoran dividen dari laba.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan sekaligus memberikan, apa, menyampaikan harapan, ya, juga sekaligus tantangan ini buat Bapak, Ibu sekalian, bahwa BUMN itu didirikan untuk mencapai *profit* sekaligus memberi



benefit pada masyarakat, oleh karena itu, kalau *profit*-nya gampang dinilai ya, dengan angka-angka, tapi *benefit*-nya ini *kan* sesuatu yang kualitatif dan harus dirasakan oleh masyarakat. Undang-Undang BUMN, apa namanya, tahun 2023 itu di Pasal 2 ayat 1() huruf e itu, di antara tugas BUMN adalah “Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan, kepada pengusaha ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat”. Jadi, disampaikan tadi oleh saudara kita juga, Pak *Mbah* Bardi itu, jangan sampai masyarakat yang mendirikan usaha dan bermitra dengan BUMN, itu menderita kerugian ya. Kalau tadi *Mbah* Bardi menyampaikan *Pertashop*, saya kira ini masalah yang sudah cukup lama, dulu sudah disampaikan kepada Pak Alvian, sekarang tentu diwariskan kepada Pak Riva ya. kebijakan-kebijakan Pertamina ya, benar-benar harus disusun dengan cerdas ya, berdasarkan kajian yang obyektif, sehingga masyarakat yang merespon ya, bekerja sama sebagai mitra Pertamina itu, diuntungkan, Pak, baik dia sebagai orang yang mendirikan *Pertashop*, atau PPT, atau agen LPG, juga harus untung, dan masyarakatnya juga harus untung, merasakan kemudahan-kemudahan ya. Ini satu contoh kasus, karena memang setiap kita ini mau RDP dengan Pertamina, ada *aja* orang-orang tertentu yang nitip pesan. Nah ini masalah *Pertashop* itu sudah sekian kali disampaikan ya, dulu sejak zaman Pak Alvian ya. Tapi masalahnya bukan *Pertashop aja*, yang lain juga, harapan kami seperti itu Pak, Pak, Pak Alvian, Pak Riva sekarang ini ya.

Kemudian yang berikutnya, tadi *udah*, sudah disampaikan tentang wacana penghapusan Peralite ya, karena ini sudah mengemuka di media, dengan diganti *Pertamax Green 92*, tentu dari sisi transisi energi ya, menuju *green energy* ini, sangat bagus, Pak. Tapi yang perlu dipikirkan *kan*, konsekuensinya tentu ada kenaikan harga, saya yakin *Pertamax Green 92 kan* jauh lebih mahal nanti daripada Peralite, karena *Pertamax Green 92 itu kan* *Pertamax 92* ditambah Bioetanol, Pak, ya, dan Bioetanolnya kalau *enggak* salah masih impor, jangan sampai nanti yang diuntungkan malah importir-importir. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak mendukung ya, terwujudnya *green energy*, tapi bagaimana Pertaminaanya membuat kebijakan yang juga sangat berpihak kepada, kepada rakyat.

Kemudian yang berikutnya, saya juga baca di media tentang apa yang disampaikan Bu Dirut ya, tentang BBN, Pak, bahan bakar nabati. Ini satu yang sangat prospek ya, sehingga kita nanti kata beliau, tidak perlu lagi impor BBM. Pertanyaan saya, sudahkah kita punya *roadmap*, Pak, untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh Bu Dirut itu, tentang bahan bakar nabati, kapan *sih* ini sebetulnya mau diwujudkan, atau hanya sebagai sebuah wacana, yang istilahnya menghibur buat kita semua?

Yang, yang terakhir, tentang LPG, Pak. Ini hasil dari, ya obrolan-obrolan ringan, Pak, ya, *ngopi-ngopi* dengan orang, saya *enggak*, tentu *enggak* bicara soal data yang detail seperti yang disampaikan oleh Pak Nyoman tadi ya, sampai tahu tempat-tempatnya. Ini konon di Jawa Timur *tuh marketshare*-nya LPG kita masih sangat kecil, Pak, jadi rata-rata horeca itu ya, mereka pakai swasta begitu ya. Tentu ini tantangan ya, ya tentu kata kuncinya adalah bagaimana pelayanan kita itu ditingkatkan pada masyarakat

dan yang kedua, harga harus bersaing ya. Mohon ini buat kajian ya ditinjau, Pak, dan bagaimana *marketshare* kita ini bisa naik di Jawa Timur.

Demikian, terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Selanjutnya kami persilakan, Pak Rudi Hartono Bangun.

F-P.NASDEM (RUDI HARTONO BANGUN, S.E.):

Ya, *makasih*, Ketua, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota,
Yang saya hormati Pak Wadirut, Ibu Direktur Keuangan dan ada
beberapa Direktur Utama dari PGN, dari PHE Power dan Patraniaga, dan
Seluruh jajaran yang hadir yang tidak saya sebut,**

Pak Wiko, Ibu,

Tadi Saya Sudah Mendengar Penjelasan Tentang Kinerja Operasional Tahun 2022 dan juga Pertamina dalam hal ketahanan energi nasional, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan dan butuh penjelasan.

Ini saya *ngelihat* di halaman 3, Ibu, Pak, Pak Wiko, jadi di sini *kan* ada 9 proyek Kilang, yang Ibu Dirut atau Pak Wiko, ataupun jajaran ini targetkan selesai dalam 5 tahun. Artinya, pengembangan usaha atau *capex* atau belanja. Nah, ini yang saya tanyakan, ini *kan* di sini saya *enggak* lihat, ini menghabiskan berapa juta atau miliar dolar *gitu*, itu yang saya ingin tahu. Jadi, lalu dalam hal ini, fungsinya nantinya setelah 5 tahun selesai, dalam hal ketahanan energi ini, apa dampaknya kalau yang belanja *project*, belanja *capex* ini, tadi Bu Emma sampaikan *gitu*. Ada hubungannya *enggak*, *project* ini menghabiskan sekian triliun, tapi energi nasional *lifting* minyaknya tidak lagi impor, misalnya, ini saya butuh penjelasan, itu yang hal pertama, Bu, Pak.

Kemudian *kan* ada yang Ibu sampaikan, Bapak, tadi, dari beberapa, dari beberapa, ini ada 9 contoh kilang-kilang yang bakal dibangun, misalnya Cilacap, Balongan-RCC, blok, Blok Merdumai, Senipah-Balikipapan dan Langit Biru, tadi saya dengar. Nah ini, ini yang tadi saya minta tolong dijelaskan *gitu*, apa dampaknya nanti, kalau kita 5 tahun lagi selesai, Pak? Kalau *enggak* ada, namanya hanya belanja modal-modal *gitu*, buat *project* itu namanya.

Kemudian yang kedua, tentang produksi migas Pertamina yang Pak Dirut, Ibu, sampaikan ini *kan* mengalami peningkatan datanya, tiap tahun ada sebesar 7%, Pak Wiko, Bu Emma tadi. Yang saya mau juga detil ini, belum saya jelas, dari penjelasan ini *ningkat* lah 7%, apakah 7% ini dari sumur Pertamina yang ada, atau dari impor *gitu*? Peningkatan ini, impor dari luar? Jadi di data ini *kan* Pertamina mengelola 24 blok migas, Pak Wiko. Data yang di, ada ini, *kan* ya. Jadi 7% ini apakah masuk dalam 24 blok ini misalnya, itu. Dan kontribusi Pertamina terhadap minyak Indonesia *kan* juga dijelaskan tadi panjang lebar, 69% Bu Emma tadi sampaikan, dan gasnya ada 34%. Jadi ini, jadi begini saya ingin tanya ini Bu, Pak, tolong yang, jelaskan yang 31% itu lah, yang dari 69 ada sisanya itu, untuk memenuhi kebutuhan energi nasional Indonesia ini, dari mana sumbernya, Pak, *gitu*? Ini *kan* 69, berarti kalau dari 100 dikurang, berapa itu 30-an, Pak? Dari mana sumbernya *gitu*. Dan gas juga kurangnya *kan* 66% dari 31, eh maaf, dari, iya, 31, 60-an% kurangnya, Pak. Nah, ini gasnya masih impor atau sudah ada sumur baru, Pak? Ini tolong Pak Wiko, Bu Emma juga detailkan, karena tadi hanya membaca paparannya.

Ketiga, Bu, Pak, Pak Wiko, Pak Wiko, Pak Wadirut dulu ketemu masih PHE atau apa ini, yang ketiga tentang investasi Pertamina, *kan* tadi dijelaskan meningkat 35%, Bu Emma tadi yang *nyebut* di 2023 ini, ini investasi seperti apa ini, Bu, Pak, Bu Emma, investasinya apakah seperti buat proyek atau program baru saja? Coba, coba bisa dijelaskan, Bu, detail tentang proyek seperti apa ini? Tadi di sini *kan* ada 9 Kilang, tapi di sebalik, berikutnya ada 18 lagi, Pak, 18, 18 *project* baru *gitu*. Dan apakah hubungannya, korelasinya sama ketahanan energi yang Bapak paparkan di *slide* ini *gitu*, ada *enggak* hubungannya Pak? *gitu*.

Dan terakhir juga, tentang rasio keuangan Pertamina 2023 Bu, Ibu Emma, dalam hal kinerja keuangan, Ibu sampaikan *kan* mengalami peningkatan dibanding 2022. Tapi *revenue*, *revenue* ini terkoreksi di akibat parameter eksternal, iya *kan*, *gitu*, Ibu tadi. Jadi maksud parameter eksternal ni apa Bu? *Gitu*. Hal-hal seperti apa *gitu*, Itu yang saya ingin, apa, mohon penjelasan dari yang dipaparkan, karena itu *kan* garis besar tadi yang dipaparkan Pak Wiko dan Bu Dirut.

Dan terakhir begini, Pak, ini *kan* selama ini, kita rapat Ibu-Bapak Pertamina induk dengan anak usaha ini atau *Subholding* ya namanya ya, jadi paling kami, kita ketemu 5-6 *Subholding*, Pak, Ibu. Yang saya ingin juga minta kejelasan ini tentang *Subholding* yang *lain* *gitu*, contohnya ini, Pak, Pelita, Pelita Air, itu *kan*, Bu Emma, Pak, Pak Wiko itu masih *Subholding* ya, apa anak perusahaan, cucu? Anak ya? Nah, itu anak perusahaan, nah juga Pertamina *Shipping* ada, Elnusa dibawah PHE. Nah ini apakah anak usaha ini seperti Pelita Air yang lambangnya Pertamina itu, Bu, pernah melapor tentang neraca kinerja keuangannya, ke induk, *gitu*? Terus pendapatan pertahunnya, EBITDA-nya, laba ruginya, mana, ada, *enggak*? *Enggak* pernah, Bu, kami *enggak* pernah dengar ini, yang hanya ke sini kita 5-6 Dirut-dirut *Subholding*.

Nah, contohnya begini, ada kita hanya dengar dari media, membeli pesawat. Pelita membeli pesawat baru, *Airbus*, begini-gini. Harusnya *kan*, apakah ini masuk *capex*, 100 triliun ini, Pak Wadirut? *Kan* kita *enggak* tahu

ini, *gitu kan?* Apa masuk belanja modal ini yang, nah, terus *leasing-leasing* pesawat yang ditambah armadanya baru, apakah juga masuk ke dalam induk Pertamina, atau mereka membeli sendiri, bagaimana kinerja keuangannya? Kami *enggak* paham, Pak, sebagai rakyat, dan sebagai wakil rakyat yang bermitra sama Pertamina, *gitu*.

Dan harga tiketnya kemudian, saya melihat, mendapat aspirasi, hampir sama sudah mahalnya sama Garuda *gitu*. Jadi kan, iya nanti sama saja nasibnya, Pak, bukan me apa, menggampangkan, memurahkan tiket untuk masyarakat begitu. Nah, jadi ini, Pak Wadirut, Pak Wiko ini, ya *kan*, Bu, Bu Emma ini yang jam terbangnya ini jadi, ke mana-mana sudah tinggi *kan*, mungkin saya perlu kalau *enggak* dijelaskan di sini, saya minta secara tertulis, tentang seperti jawaban tadi, begitu.

Terima kasih, Pimpinan, saya kembalikan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Masih ada Pak Gde Sumarjaya Linggih, kemudian pendaftar baru, Pak Jon G, Pak Erizal dan Pak Khilmi, mohon waktu dipersingkat.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Terima kasih, Pimpinan.

Ya saya tidak banyak menyita waktu, karena banyak teman-teman sudah mengomentari tentang apa yang disampaikan oleh Direksi Pertamina.

Yang saya hormati teman-teman Komisi VI DPR RI, begitu juga para Direksi Pertamina yang hadir pada hari ini, yang saya hormati,

Saya, apa, apresiasi sekali dengan capaian *cost optimization, de optimization* dari Pertamina, di mana mencapai lebih dari 22%, ini merupakan prestasi yang luar biasa menurut saya, untuk *cost optimization*. Ada hal yang lain, yang saya ingin sampaikan, yaitu banyaknya sekarang ini, BUMN tidak hanya di Pertamina, banyak mempunyai asset *yang idle*. *Asset idle* ini biasanya lagi di tempat-tempat yang sangat strategis, nah ini mungkin perlu di optimalisasi aset-aset dari Pertamina ini, karena ini kalau di, tidak dikerjasamakan atau dibiarkan *idle*, tentu akan membebani Pertamina. Ini menjadi *liabilities*, bayar pajak *kan gitu*. Nah ini. Dan juga akhirnya menghambat daripada pertumbuhan ekonomi di sekitar lahan yang strategis tersebut, yang lahan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi itu *gitu*, ya. Jadi ada dua kerugiannya, kena *liabilities*-nya adalah karena pajak dan sebagainya, pemeliharannya. Yang kedua, yang harusnya juga menghasilkan, yang dilakukan oleh Pertamina, akhirnya, tidak, tidak dapat *gitu* ya, di samping itu, secara menyeluruh, dampak daripada ekonomi dari

lahan tersebut terhadap masyarakat sekitarnya juga tidak optimal itu. Oleh karena itu maka saya minta, segera di, apa, di *mapping* dengan baik, mana-mana aset-aset yang *idle* yang sudah tidak mungkin rasanya di tahun-tahun ke depan untuk dipakai *gitu*, ya ini harus segera dikerjasamakan ataupun sekali dilepas untuk tidak menjadi beban, yang lebih tinggi dari Pertamina itu sendiri.

Tadi banyak, saya turut berduka kita juga itu dari apa yang disampaikan Pak Nyoman Parta, sampai soal data-data dan sebagainya. Tapi per hari ini, Bu, yang dari 18 yang, apa, Pak Alvian, yang dari 18 yang terbakar kemarin itu, 5 sudah meninggal, Bu, 5 sudah meninggal dunia. Jadi saya kebayang itu keluarganya bagaimana sedihnya *gitu*, sebagai sumber, apa, pendapatan sebagai sumber penghidupan bagi keluarganya meninggalkan. Dan tentunya, kesejahteraan keluarga itu pasti akan menurun, apalagi kalau ada tanggungan-tanggungan yang masih sangat berat untuk mereka. Nah, untuk itu, *oke* kita mungkin dari Pertamina tidak bisa menuntut secara hukum, itu ranahnya polisi, mungkin nanti untuk mengembangkan apakah menjadi pidana atau perdata. Tapi ada hal yang lain daripada Pertamina yang bisa lakukan, yaitu soal kebijakan. Kebijakannya apa ya *punish and reward*, *punish*-nya di mana, yang melanggar-melanggar itu *kan* agen sebenarnya, itu pasti itu besar-besaran *tuh* urusannya ya, ya caranya ya, *punish* secara kuota mereka, sehingga apa? Keuntungannya mereka akan menurun, ketika keuntungan menurun, nantinya ada efek jera, Pak, nah dari efek jera itu, mereka akan hati-hati terhadap, apa, menyebarkan daripada, apa yang menjadi subsidi ini.

Itu harapan saya dan mudah-mudahan dengan kebijakan yang, kewenangan yang Bapak miliki dari Pertamina ini, juga mampu membuat jera. Karena biasanya, Pak, kalau yang soal hukum dan sebagainya, pasti pengurusnya yang main-main banyak *tuh*, pengurusnya yang main-main, jadi yang kena nanti pengurusnya, kalau soal hukumnya. Tapi kalau soal rugi dan untung ini dikenakan kepada perusahaannya, maka nanti akan hati-hati, pemiliknya akan hati-hati memberikan, memilih pengurus ataupun akan terus mengontrol pengurusnya dengan baik, sehingga akhirnya tidak terjadi apa yang terjadi pada saat ini. Mudah-mudahan dengan makin tertibnya ini, kelangkaan daripada subsidi ini juga bisa kita selesaikan, termasuk juga nanti karena keduanya kena, antara pengurus dan pemilik, pemiliknya karena sanksi keuntungannya menurun, *gitu*, ya tentunya pengurus yang melakukan kejahatan tersebut kena sanksi hukum.

Nah itu barangkali dari saya, terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Selanjutnya ke sebelah kiri, mohon waktu dipersingkat, Pak Khilmi.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,



**Yang saya hormati Ketua Komisi VI beserta Anggota,
Yang saya hormati Wadirut Pertamina beserta jajarannya,**

Jadi saya aspirasi, kinerja Pertamina yang sudah bagus, Pak, tetapi ini *kan* harus, banyak yang harus diperbaiki, karena pemerintahan ke depan ini, energi, pangan, dan ketahanan negara itu adalah prioritas yang utama. Jadi tadi teman-teman sudah menyampaikan tentang kinerja Pertamina, tapi saya cuma menyoroti ini tentang banyaknya *Subholding* yang ada di Pertamina, ini harus dibuat kajian, jangan sampai dengan adanya banyaknya *Subholding* ini mengakibatkan biaya beban Pertamina itu jadi tinggi, sehingga BBM itu akan sangat mahal dibandingkan di negara-negara tetangga kita, karena HPP itu sangat tinggi.

Dan yang kedua, dengan meningkatnya harga LPG di luar negeri ini *kan* membuat beban subsidi BBM ini *kan* sangat tinggi, saya membaca dengan sambungan jargas, yang dilakukan Pertamina melalui *Subholding* PGN, ini sambungan-sambungan ini *kan*, jangan berharap dari anggaran APBN *aja*, Pak. Jadi di mana sambungan jargas yang sudah ter-*connect* di antara desa atau kecamatan yang sudah ada, itu harus diteruskan. Jadi kalau sambungan misalnya di desa saya itu, di GKB, antara Gresik Kota Baru dengan GKA itu *kan* berdampingan Pak, tetapi di GKA-nya ini, tidak disambungkan dengan adanya jargas. Ini *kan* harusnya tidak berharap dengan anggaran APBN *aja*, di mana kalau Pertamina isu bisa membuat sambungan dengan anggaran yang diperhitungkan itu masuk dalam hitungan tidak rugi, ya tolong diterusin *gitu loh*.

Jadi jargas ini jangan berharap dari anggaran APBN *aja*, ini kalau jargas ini jalan *kan* bisa mengurangi pemakaian subsidi LPG yang 3 kilo dan saya *denger*, anggaran itu dibutuhkan cuma 7 triliun, untuk menyambung jargas secara baik di seluruh kabupaten yang telah ter-*connect* oleh jaringan jargas *gitu loh*. Dengan uang 7 triliun, tapi *kan* bisa menghemat LPG itu sangat besar. Dan itu *kan* tidak jangka pendek gitu, ini *kan udah* bisa jangka panjang, jaringan gas rumah tangga itu akan sangat efektif *gitu loh*.

Jadi harapan saya, untuk jaringan jargas ini, tolong jangan berharap dengan anggaran dari APBN *aja* tapi bagaimana PGN ini bisa meng-*connect*-kan jaringan yang dianggarkan dari APBN, tapi jarak-jarak perumahan yang padat penduduk dengan jaringan yang telah ad, ini *dibikin, gitu loh*.

Itu dari saya, Pak Ketua, *enggak* panjang-panjang, mudah-mudahan Pertamina bisa melaksanakan itu, sekian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Khilmi.

Saya perpanjang dulu, maksimal 1 jam.

(RAPAT: SETUJU)



Silakan, Pak Jon Erizal.

F-PAN (Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan teman-teman Komisi VI,
Pak Wiko, Pak Alvian, Bu Emma, Pak Riva, dan seluruh Direksi yang
hadir,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Menarik ini, tentu apresiasi yang dalam atas capaian kinerja yang luar biasa, menurut saya. Dan mudah-mudahan ke depan ini akan lebih baik lagi. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan, pertama, kalau *ndak* salah, Pak Erick pernah *me-launching* 100, *a hundred billion* pertama ya, target pertumbuhan Pertamina itu, ini sudah tinggal sedikit lagi, kira-kira kapan capaian itu jadi 100? Ini sekarang *kan* 91,12 *billion* ya, *US Dollar*.

Nah kemudian, neraca atau laporan keuangan yang disampaikan itu *kan* sudah konsolidasi Pak Wiko, Bu Emma ya, tolong nanti tertulis, di setiap anak usahanya itu disampaikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi akan kelihatan, apa Pelita, segala macam itu, kelihatan, ujungnya baru yang ini, jadi *clear*. Nanti kita mau *men-stressing* yang mana, perlu kebijakan apa, *kan* lebih mudah fokus ke anak-anak usaha yang memang perlu mendapat dukungan penuh dari Komisi VI.

Kemudian di sini sandingannya itu, Bu Emma, itu, dengan 2022 *kan*, harusnya juga ditambahkan rencana kerja 2023, baru realisasi yang sekarang *gitu*. Ada sandingan, itu tolong juga disampaikan. Jadi kita lihat, bukan hanya 2022 sebagai *benchmark* kita, tapi juga target kerja yang dilakukan atau dibuat pada 2023 itu seperti apa realisasinya, jadi di situ juga kita melihat ini tercapai *enggak gitu*, kita *enggak* tahu juga, mungkin akan lebih dari target, atau mungkin kurang dari target, sebabnya apa? Nah, ini kita bisa bahas bersama-sama *gitu*.

Kemudian buat Pak Riva, ini distribusi gas *nih*, Pak Alvian tolong diawasi juga, di pulau-pulau, Pak, baik gas dan BBM. Itu saya melihat banyak Pulau Bengkalis, tempat lahir saya, Pulau Rupa, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rangsung, itu *kan* daerah 3T semua itu, rasanya masih jauh dari harapan untuk pendistribusian itu, oleh karena itu, mohon mendapat perhatian.

Kemudian juga, terima kasih kepada Pertamina terutama, Patra Niaga tentunya. Pertashop itu sudah diizinkan menjual Pertalite sesuai usulan kami sebelumnya. Tapi tolong kriterianya itu disampaikan atau disosialisasikan, banyak yang bertanya, "apa yang harus kami lakukan", mereka pada bingung di lapangan.

Kemudian saya ingin menyampaikan juga, banyak program-program investasi yang akan dilakukan, ini penting sekali. Karena tentunya kita akan mendorong. Harapan kita tentunya, peran Pertamina ini, mungkin sebagai salah satu yang terbesar BUMN di Indonesia, punya kontribusi lebih besar lagi terhadap penerimaan negara, sehingga dividen yang kemarin kami rapat sama Pak Menteri itu, *Insyallah* akan tercapai, meningkat menjadi 85 triliun, nah, tahun berikutnya ini, harapan kita tentu lebih besar lagi, karena apa? Karena target pertumbuhan nanti dari Pemerintah yang baru ini *kan* di atas 5%, 6 sampai 8%. Nah, ini kalau, kalau peran dari BUMN tidak besar, tentunya nanti akan berat, peningkatan pajak ataupun penambahan utang yang dilakukan oleh pemerintah baru. Oleh karena itu tentunya kita berharap kontribusi dari Pertamina ini juga besar, begitu juga BUMN-BUMN yang menjadi *pre-mover* daripada seluruh BUMN yang ada di Indonesia.

Jadi menurut saya, usulan-usulan terhadap investasi itu, diperbesar *aja*, Pak, sesuai target. Kita tentunya mendukung program investasi tersebut, sepanjang *return*-nya memang bisa dipertanggungjawabkan dan ujungnya tentu bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara. Sehingga walaupun nanti pertumbuhan kita, bisa tercapai, katakanlah 6 sampai 7%, namun tidak membebani terhadap pajak yang dibebankan kepada rakyat, karena solusinya *kan* hanya itu saja, Pak, pajak yang ditingkatkan, kemudian tentu harapan kita, peningkatan itu terhadap *tax ratio*. Tapi yang kedua juga kita berharap jangan sampai, yang ditingkatkan itu adalah *percentage* daripada wajib pajak, nah, ini *kan* menjadi beban lagi, sekarang *kan* sudah naik menjadi 12%.

Nah kemudian yang kedua, tentunya dukungan itu dari PNBP. Yang ketiga itu, harapan paling besar adalah dari dividen BUMN, nah ini juga kita berharap kontribusinya akan maksimal, sehingga *Insyallah* ke depan negara kita ini semakin *smooth* dalam proses pembangunannya.

Saya rasa itu sementara, eh sedikit lagi, saya melihat juga ekuitas kita *nih* bagus *nih*, Bu Emma, 41,43 dibandingkan total aset tu 48%, ini tentu dari sisi keuangan, kita bisa paham lah, bisa di *leverage*, begitu tinggi *gitu*, belum, belum perlu PMN lah, kalau menurut saya. Bisa di-*leverage* begitu besar, sehingga investasi-investasi itu digenjot *aja*, Pak Wiko, sampaikan ke, untuk mengejar tadi, supaya pertumbuhan ini betul-betul menjadi raksasa lah, di negeri kita ini.

Demikian.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Pak Jon.



Selanjutnya kami persilakan, terakhir dari kawan-kawan Anggota Komisi VI, Pak Adisatrya.

F-PDIP (ADISATRYA SURYO SULISTO):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang kami hormati Pimpinan dan rekan-rekan Komisi VI,
Bapak Wadirut beserta jajaran Direksi *Holding dan Subholding,***

Sudah banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Mungkin yang global dulu, tentunya apresiasi terhadap kinerja Pertamina, di dalam tekanan global, kurs *dollar* terhadap rupiah, masih bisa menjaga *performance* keuangan yang baik.

Tentunya saya minta juga, Bapak, dalam, apa namanya, data-data global ini, rasio, termasuk sekarang masuk, apa, meraih *ranking* 141, ini tentunya, walaupun, ini sudah sepantasnya, karena Pertamina ini, *national oil company* kebanggaan kita, ya kita harapkan bisa terus masuk di dalam *list* ini. Nah, ke depan, saya minta tolong disandingkan juga, dibandingkan dengan perusahaan *national oil company* serupa ya, terkait dengan *reserve, reserve, replace ratio* dan juga *reserve to production*, ini rasio-rasio yang mungkin bagi kami yang awam, tidak begitu paham, apa namanya, angka-angka ini, tapi kalau, tolong disandingkan dengan misalnya Petronas dan PTT Thailand, dan lain-lainnya ini bagaimana, secara perbandingan terhadap Pertamina? Itu yang pertama.

Yang kedua, kami lihat di sini, ada 9 proyek Kilang yang sudah selesai dalam 5 tahun terakhir, nah, ini kebanyakan adalah *revamping, upgrading, dan revitalisasi*. Nah, terkait dengan hasil dari *upgrading, revitalisasi, dan revamping* ini, bagaimana dari segi efisiensi *cost* dan produksi dalam beberapa tahun terakhir ini? Tadi secara global, sudah dijelaskan, apa namanya, banyak sekali *cost optimization* yang sudah berhasil. Nah, terkait dengan proyek-proyek Kilang ini bagaimana? Karena ini juga suatu parameter di mana kita bisa mengukur keberhasilan investasi, di dalam *upgrading dan revitalisasi* Kilang-kilang ini.

Ketiga, terkait investasi yang juga saya lihat, Pertamina sangat aktif dan meningkat, banyak yang bertanya, khususnya teman-teman daerah ini, investasi mana yang bermitra dengan pemerintah daerah? Misalnya melalui BUMD. Kami ingin tahu kolaborasinya seperti apa, kalau ada, dan memberikan manfaat apa, untuk daerah-daerah, terutama daerah penghasil minyak dan gas?

Yang terakhir, keempat, tadi turut prihatin tentunya yang disampaikan oleh Pak Nyoman Parta, terkait dengan, apa, gas melon yang terjadi di Bali. Saya kira ini peningkatan terhadap pengawasan harus lebih ketat, dan tadi sudah dijelaskan bahwa digitalisasi, dari hulu ke hilir sudah terintegrasi di

Pertamina. Saya kira ini bisa diperluas juga untuk para mitra kerja, termasuk agen-agen dan lain-lainnya, distributor, sehingga semua itu secara digital, terkoneksi, kita bisa monitor apa yang mereka dapat secara *input* dan juga *output* mereka. Dan di situ akan pasti kelihatan, pihak-pihak yang melakukan *praktek-praktek* yang tidak baik, seperti mengoplos ya, *kan* kita bisa lihat dari segi data, *input against outputnya* seperti apa. Jadi mungkin digitalisasi ini perlu, sangat perlu diperluas bukan hanya di internal Pertamina saja, tapi juga ke seluruh mitra kerja Pertamina, untuk memonitor bisnis proses yang mereka lakukan.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pimpinan, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Dari meja Pimpinan, kami persilahkan, Pak Martin.

WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, *makasih*, Pak Bimo.

Pertama ada tiga hal yang ingin saya sampaikan untuk Pak Wiko dan seluruh Pimpinan dari *Subholding*, yang pertama, saya mengapresiasi secara *general performance* yang membaik, baik dari sisi korporasi, maupun dari sisi keuangan, tentu kita harapkan, *performance* ini bisa dipertahankan dan kemudian ditingkatkan.

Nah yang kedua, terkait dengan hal ini adalah tentu yang harus juga dijawab, bagaimana korporasi Pertamina dan seluruh *Subholding*-nya memberikan *response* terhadap *global disturbances* yang terjadi sekarang. Utamanya yang terkait dengan energi yang bisa kemudian menjadi, apa, memberikan *multiplier effect*, kepada sektor-sektor lainnya termasuk di pangan. Bagaimana hulu memberikan *response*, bagaimana hilir memberikan *response*, ini saya rasa penting untuk kita ketahui juga, Pimpinan, Pak Ketua, karena tantangan yang kita hadapi ini tidak mudah dan kondisi global tentu kendalinya bukan ada di kita, jadi kita lebih bagus untuk memberikan dampak mitigasinya seperti apa, mitigasi dampaknya.

Nah, memang tema hari ini tadi saya cek, evaluasi dari kinerja korporasi, mungkin sebenarnya, supaya lebih *nyambung* harusnya juga ke rencana kerja di 2025, jadi kita bisa memiliki satu pemahaman yang sama, bagaimana Pertamina ini harus *me-response* seluruh, apa namanya, keguncangan-keguncangan yang terjadi di global, agar kita bisa minimasi, minima, diminisasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Sebagaimana kita tahu, misalnya, kenaikan harga *crude oil*, masih terjadi. Saya lihat terakhir angkanya itu rata-rata di 9,6% di tahun 2024. Nah, kalau ini terus terjadi, ditambah lagi dengan fluktuasi nilai tukar, di mana memang rupiah masih, katakanlah tertekan terhadap *US Dollar*, tentu ini akan sangat berdampak bagi Pertamina. Nah, ini juga perlu kita dengar, atau kita tahu, bagaimana Pertamina membuat perencanaan terhadap hal ini. Mungkin karena topik atau apa, tema rapatnya belum sampai ke sana mungkin bisa secara tertulis Pak, nanti disampaikan kepada kami, supaya kami juga bisa mempelajari dengan lebih detail, bagaimana 2025 yang akan dilakukan oleh Pertamina dan juga di 2024 ini bagaimana persiapannya.

Yang ketiga, Pak, tadi apresiasi secara *general*, tapi tentu masukan dari kawan-kawan ini, me, apa, menunjukkan memang, *the devils is in the details* ya, pengawasan terhadap pelaksanaan teknis. Tentu ini, ya mungkin tidak bisa atau *scope*-nya itu bukan di Pertamina secara persero ya, karena memang ada *Subholding-Subholding* yang memang harus menanganinya., Nah, ini yang harus kita, apa, tingkatkan pengawasannya. Tadi Pak Parta sudah mengatakan persoalan LPG 3 kg, itu betul, terjadi di semua wilayah, termasuk ketika saya, pada waktu itu 2 tahun yang lalu itu, sempat untuk meninjau ke lapangan, itu juga terjadi pengoplosan itu, Pak. Jadi ini kita juga penting untuk mengetahui bagaimana detail-detail seperti ini ditangani oleh, mungkin Pertamina Patra Niaga ya.

Nah, yang terkait dengan hal ini juga, hal-hal detail seperti ini, Pak, kita pernah beberapa kali rapat di sini, merespons, misalnya contoh soal kebakaran di Kilang-kilang Pertamina. Nah, tapi kemudian, ketika isunya itu mereda, kita juga tidak tahu, kesimpulan soal kebakaran ini sebenarnya seperti apa? Lalu bagaimana respons dari Pertamina untuk bisa memperbaiki *safety* di Pertamina. Karena saya mendapat informasi, Pak Wiko, kalau dibandingkan dengan kebakaran di kilang-kilang lain, kebakaran di Pertamina ini waktunya, waktu pemadamannya relatif lebih lama. Nah, ini mungkin menarik, Pak, Bapak perlu lihat nih, siapa yang menangani HSE, HSE itu di persero, atau di ini ya, atau di Kilang, Pak? Oh di, di Persero ada? Di *Subholding* juga ada? Nah, apa penyebab dia padamnya, waktu untuk padamnya itu lebih lama? Nah, ini juga, informasi ini menurut saya harus kita dalami juga, Bapak bisa cek ke lapangan, agar benar-benar, mungkin entah desainnya atau, apa namanya, perangkat-perangkat pemadamannya, dan lain sebagainya, itu mungkin bisa di cek, Pak.

Jadi *overall* secara *performance* korporasi saya apresiasi, *but let's go into the details*, supaya memang masalah-masalah ini tidak kemudian, menguap begitu saja ya. Jadi setelah isunya *enggak* ada, terus kemudian, kita seakan-akan tidak punya, tidak tahu kesimpulannya kemudian apa, apa menjadi penyebab, dan apa yang sudah dilakukan. Lalu kemudian kalau terjadi lagi, kita heboh lagi, ini kadang-kadang suka begini *nih*, di BUMN *nih*, Pak. Terus-terang *aja*, kemarin waktu dengan Pak Menteri BUMN juga, kita kasih input soal pengawasan. Karena memang setelah ada masalah, kita terkaget-kaget, Pak, terkaget-kaget, seakan-akan, padahal ketika rapat secara reguler seperti ini, sepertinya beres *gitu*.

Jadi saya pikir itu masukan dari saya, Pak Bimo, saya kembalikan ke Pak Ketua.

Makasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih.

Ada 8 sebelah kanan, kemudian sebelah kiri 6, jadi 14 *plus* Pimpinan, beberapa hal yang kami sampaikan, di respons saja, Pak, yang memang itu penting-penting sekali buat publik dan buat masyarakat. Banyak hal tadi menyinggung soal program subsidi gas di Indonesia, yang sebenarnya itu terbagi dua, konsumen subsidi LPG 3 kiloan, itu untuk golongan ekonomi, program ini ditunjukkan masyarakat miskin dan rentang miskin. Identifikasi awal 2024, Pemerintah Indonesia menerapkan pendaftaran untuk subsidi 3 kiloan, konsumen berhak mendapatkan subsidi, harus terdaftar dalam program ini. Ini saya kira perlu di cek secara detail dan persyaratannya sebenarnya hanya meliputi, terkait dengan KTP, dan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, ini yang masih sulit diterapkan saya lihat di lapangan.

Kemudian konsumen gas yang jargas, Pak, ini bagaimana supaya tidak tumpang-tindih, ini untuk golongan ekonomi, jargas ini rumah tangga berpenghasilan rendah, yang subsidi jargas. Untuk persyaratannya, jargas, tentunya memenuhi kriteria, yang terkait dengan instalasinya bagaimana, untuk masuk ke kelompok itu, tidak, tidak mudah.

Kemudian masalah-masalah yang muncul sudah dikemukakan teman-teman untuk yang LPG 3 kiloan, saat ini memang lebih masif, diberikan secara luas. Sehingga sasaran tadi, banyak dinikmati oleh semua masyarakat, termasuk yang mampu. Hal ini bagaimana ya, supaya tepat sasaran ya, dan tidak membebani anggaran negara ya. Ditambah tadi disinggung juga adanya pengoplosan-pengoplosan, yang perlu dibentuk tim khusus dan program subsidi gas ini supaya lebih tepat sasaran, apakah dengan digitalisasi, tapi *kok* kalau dengan digitalisasi, kalau pupuk, kemarin saya juga kebayang-bayang, kadang justru menjadi problem rakyat kecil. Tapi itu perlu dijajaki, Pak, perlu dicoba, Pak, berbagai program seperti digitalisasi, diharapkan ke depan, subsidi itu mampu sampai ke masyarakat yang membutuhkan, serta membuat program ini lebih efektif dan efisien.

Tumpang-tindihnya, nanti kita lihat, Pak, antara yang jargas dengan yang LPG 3 kiloan, supaya tidak tumpang-tindih, bagaimana dalam keterkaitan memenuhi kebutuhan energi, ketidakefisienan subsidi dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin, malah dinikmati mereka yang mampu membeli sendiri. Tadi diceritakan beberapa teman, untuk solusinya, mungkin dia tidak bermaksud untuk makai 3 kiloan, tapi ada yang lima kiloan ini bagaimana, Pak, untuk lebih diperbanyak. Dan distribusinya, bisa *enggak* ditumpangin yang tiga kiloan *gitu*, karena kecenderungan, yang 3 kiloan ini tidak berani jual, gas yang lainnya.

Kemudian beban anggaran negara, kita harapkan bisa diperkecil untuk tidak terjadinya tumpang-tindih. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tumpang-tindih penerima subsidi, ini penting diatasi dan kami berharap hal-hal yang terkait dengan kajian-kajian untuk *cost and benefit* dari sisi dampak sosial, juga kesiapan infrastruktur dan kebutuhan konsumen, terkait wacana pertalite dengan Pertamina *Green 92* ini Pak, dikaji betul-betul supaya nanti pelaksanaannya tidak menimbulkan berbagai persoalan.

Pokoknya dunia ini mau, mau, mau terjadi apapun, mungkin perang atau gejolak yang meluas, Pak, yang penting energi aman dan pangan ada, itu kita *enggak* akan masalah ya, ini yang saya kira kita cukup. Bukan pesimis ya, skeptis dengan berbagai hal yang terjadi di global. Tapi kalau laporan ini, tetap akan terjadi seperti ini, saya *kok* yakin dan mengapresiasi ya, kita akan mampu bernavigasi ya, untuk pertumbuhan di internal Pertamina, maupun mengatasi situasi geo, politik globalnya, dengan fluktuasi nilai tukar rupiah kita yang turun, disertai dengan berbagai situasi distribusi *crude* dan BBM, yang kalau terjadi apa-apa, misalnya di Terusan Suez dengan semakin menegangnya di Timur Tengah, misalnya. Hal yang semacam ini saya kira, harus betul-betul mencari opsi-opsi, kalau terjadi *plan A, plan B, Plan C*, itu seperti apa, dari Pertamina. Sehingga ketahanan energi kita kuat, karena kita harus punya ketahanan energi dalam kondisi tidak berdaulat, untuk kebutuhan energi nasional kita, apalagi dengan naiknya kebutuhan BBM kita, dengan produksi *crude oil* yang mulai merangkak naik, kita apresiasi. Tapi 1,5 atau 1,6 *barrel* per hari itu, dengan kemampuan 600 sampai 700, sehingga impor kita hampir masih 1 juta, ini perlu langkah-langkah, opsi-opsi, berbagai opsi kalau terjadi berbagai hal, yang mungkin bisa terjadi perubahan secara cepat dengan asumsi *dollar* kita, *kalo enggak* salah APBN tu 15.800 ya, 300 atau 400, 800? Itu penting diantisipasi dan koordinasi lintas sektoral Pertamina perlu, karena fungsi Pertamina yang tidak hanya *benefit* korporasi, tapi juga menyangkut berbagai fungsi untuk kepentingan nasional.

Dengan demikian, cukup pendalaman dari kami, kami persilakan Pak Dirut untuk direspon beberapa hal yang penting, sebelum rapat nanti kita akhiri. Kalau ada hal yang lebih penting dan tertutup, nanti kita buat forum-forum khusus untuk pendalaman, karena terus-terang, kita juga membuka diri untuk hal-hal yang sifatnya butuh keputusan politik, guna kebutuhan dan ketahanan energi nasional dalam situasi yang *uncertainty*, terutama situasi global itu penting kita bicarakan, Pak Wadirut.

Waktu dan tempat kami persilakan.

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Terima kasih, Pimpinan.

Sungguh masukan yang sangat berharga bagi kami, selalu *me-remind*, mengingatkan, bukan hanya masalah situasi makro ekonomi, situasi global, juga masalah operasional yang harus ditingkatkan, ini akan selalu kami perhatikan. Kami *commit* untuk menjadi, apa, pegangan di dalam mengarungi,

pengelolaan perusahaan di tengah situasi yang *volatile*, memang industri migas ini sangat *volatile*, Pak, *volatility*-nya sangat tinggi, tidak hanya dipengaruhi oleh *supply*, *demand*, tapi juga dipengaruhi oleh geopolitik, regulasi, dan lain sebagainya.

Namun *track record* kita, dari tahun 2021 semasa Covid, Pak, ya, sampai sekarang, menunjukkan *trend* yang positif, mudah-mudahan ini bentuk dari apa yang telah kita upayakan selama ini untuk Pertamina, supaya bisa tahan terhadap situasi yang berkembang. Dan hari ini kami diingatkan kembali oleh Bapak-bapak di Komisi VI itu sangat kami hargai, kami apresiasi, Pak.

Sedikit mulai menjawab, Pak, kita mulai dari yang *strategic* mengenai *supply*, *demand*, di negara kita, yang terus kita perhatikan, karena hari ini masih menyebabkan *import*, Pak, ya. Memang kalau kita perhatikan itu ada dua hal, yang menyebabkan import itu, *demand* yang terus meningkat, sementara *supply* dapat saya katakan, stagnan di beberapa tahun terakhir, tidak lagi menurun, Pak.

Kalau kita bicara industri hulu, kita perhatikan memang penurunan itu *decline*-nya tinggi dari tahun 2015 sampai 2020, Pak. Namun kalau kita perhatikan 2021 ke sini, ke belakang, produksi nasional itu lebih stagnan, dan Pertamina ada di 10 besar blok terbesar produksi minyak di nasional. Kalau produksi gas, *Alhamdulillah* sampai hari ini kita masih cukup, sehingga masih ada diekspor, PR-nya adalah, untuk gas ini adalah bagaimana mengembangkan infrastruktur nasional, untuk menyalurkan gas sebanyak-banyaknya ke konsumen, juga mengajak para pengguna gas, para pengguna energi primer, beralih ke gas di masa energi transisi ini Pak, potensi gas masih banyak.

Di sektor minyak, memang tadi saya katakan produksi berapa tahun ini stagnan. Itu sebetulnya kalau di kami, Pak, di orang-orang hulu, ini menunjukkan tanda-tanda yang baik, Pak, karena hulu secara natural itu ada yang namanya natural *decline* ya. Pertamina sendiri dalam berapa tahun terakhir, sudah bisa menahan *natural decline* dari 19%, menjadi hanya 2%. Dan ini tentu saja dikontribusi dari program-program kerja *capex* yang kita keluarkan. Tadi dikatakan Bu Emma, ada sekitar 60% itu di hulu, untuk apa *sih capex* tersebut? Antara lain adalah untuk *development*, Pak, untuk *development* dengan melakukan kegiatan *infill drilling*, pengeboran, menambah titik serap, sehingga bisa melawan *declining*, Pak, bisa melawan *declining*. Pada kesempatan tertulis, nanti kami akan menunjukkan berapa hasil dari, apa, investasi yang kami keluarkan di, di *development* di, di hulu.

WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dan rencana ini, Pak, ya, rencana sumur-sumur barunya berapa, di 2025?



WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Baik, Pak.

F-P.NASDEM (RUDI HARTONO BANGUN, S.E.):

Izin juga, Pimpinan, *dikit*.

Pak, *capex* tahun lalu juga sekitar ratusan triliun, tapi hasilnya apa gitu, ini sekarang ratusan juga kan Pak.

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Ya, itu mungkin dengan sederhana, dapat saya gambarkan, apabila kita tidak melakukan apapun, di hulu, maka produksinya akan turun 19%, Pa. Namun kita melakukan aktivitas-aktivitas *development* untuk mempertahankan produksi di lapangan *existing*. Nah, bagi kami, Pak, produksi yang stagnan ini, di, ini menunjukkan tanda-tanda bahwa kita akan naik. Kalau Bapak-bapak perhatikan, mungkin di beberapa waktu terakhir, temuan-temuan eksplorasi sekarang banyak didapat, Pak, baik yang didapat oleh Pertamina, maupun yang didapat oleh K3S lainnya, dan ini memerlukan waktu, sekitar 4-6 tahun untuk bisa produk, berproduksi.

Artinya, masa depan itu sudah mulai kelihatan, Pak, *discovery* sumurnya ada, *discovery* eksplorasinya ada, selanjutnya bagaimana kita meningkatkan untuk, apa, mempercepat untuk produksi. Nah, tentu saja dukungan-dukungan di sini, ada yang kami perlukan. Hari-hari ini kami juga sedang berbicara dengan teman-teman *stakeholder* terkait di *upstream*, bagaimana memperbaiki *fiscal term*, Pak, perusahaan di hulu, dengan begitu kita bisa menambah cadangan yang ekonomis untuk dikerjakan, sehingga kita bisa meningkatkan produksi dengan cepat, itu di sektor hulu, Pak.

Kemudian kontribusi kami juga di hilir, sebetulnya kalau kita lihat, impor BBM saat ini sudah menurun, seiring dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang *blending biofuel, biodiesel* 35% dari kami, berarti 35, 35% solar bisa diturunkan, ini akan diteruskan untuk program berikutnya ke B40. Tadi ditanyakan di 5 *project*, 5 tahun terakhir *project* di kilang-kilang, itu dominan memang untuk kita meningkatkan penggunaan *Bio* ini, Pak, itu juga akan mengurangi, tentu saja impor *product*, Pak.

Jadi secara, secara makro seperti itu, Pak, kontribusi kami. Di samping juga, untuk meningkatkan *utilisasi* gas, Pak, jargas, terima kasih tadi diberi masukkan untuk terus mempercepat. Dapat kami katakan sekarang ini pengembangan infrastruktur jargas yang berasal dari APBN sudah tidak ada lagi, sekarang ini adalah jargas mandiri. Tentu saja ketika mengembangkan ini, teman-teman di PGN harus menghitung secara cermat, agar investasinya itu dapat memberikan harga yang dapat diterima oleh masyarakat. Kami sudah punya kluster-klusternya, pada kesempatan tertulis nanti akan kami sampaikan ke Bapak-bapak sekalian, juga produksi di NRE juga kami



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Dirut, dikit Pak Dirut, jargas mandiri itu komersial oleh PGN ya?

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Betul, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kalau yang jargas subsidi itu program APBN?

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Sebetulnya jargas APBN itu sudah berakhir beberapa tahun yang lalu, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi *udah enggak* ada?

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Udah enggak ada.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Cuma memang, harga gas untuk jargas, itu masih, masih ada.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh subsidi?

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Harganya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Yang jargas mandiri, tapi subsidi?

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Iya, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Masih ada, oke.

Iya Pak, tadi pertanyaan-pertanyaan tentang hulu kami jelaskan secara tertulis, Bu, apa, kontribusi kami di, apa, di, di koridor, blok koridor, 30% tersebut, itu juga membahas *fiscal term*, agar didapat cadangan-cadangan yang lebih baik lagi, kebetulan kita bukan operator di situ.

Untuk Masela dapat kami katakaa, kami menargetkan final *investment decision* itu di akhir 2026 atau awal 27, supaya tahun 29 atau 30 sudah berproduksi, hari-hari ini aktivitasnya *fix* sudah selesai, memasuki persiapan *bid* dokumen untuk lelang, kita diskusikan dengan SKK Migas.

Kemudian masuk ke operasional, Pak ya. Tadi kami sependapat bahwa Pertashop ini sangat baik, Pak, ya. Namun karena dalam implementasinya ada disparitas harga, pada situasi harga-harga BBM, *sorry*, harga *crude* yang tinggi, *men-trigger* harga *product* yang tinggi, di sini Pertamina tidak terlalu diminati, Pak, ya. Namun kami sudah punya beberapa program untuk *reseller* lainnya, yang pertama itu jangka pendek dengan pilihan menjual JBKP Peralite dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, kemudian *pricing* mungkin yang akan membuat kompe, kompetitif, termasuk memberikan *additional margin* kepada pengusaha dan juga diperkenankan tidak melarang Pertashop untuk menjual LPG 3 kg. Mudah-mudahan program-program ini bisa mengembalikan kembali, efektivitas Pertashop tersebut. Tentu saja kami juga harus bicara dengan, apa, regulator, dalam hal ini BPH Migas, untuk lebih kembali meningkatkan *utilisasi* di Pertashop.

Mengenai LPG, kami memberikan komitmen dan perhatian yang penuh, Pak Nyoman, kami berempati atas terjadinya kecelakaan di Bali. Tentu saja dalam kapasitas kami sebagai badan usaha, sanksi-sanksi tegas telah diberikan, pencabutan izin dan lain-lain. Namun untuk hal-hal yang terkait dengan pidana, Pak, kami memerlukan kerjasama dengan aparat terkait. Dan tentu saja masukan dari Bapak-bapak yang memiliki banyak konstituen itu sangat kami perhatikan.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Pak Wadirut, izin, Pimpinan, sama Pak Dirut Patra Niaga, saya baru saja dapat informasi bahwa kenapa *rapi*, hasil pengoplasan itu sampai ke konsumen, khususnya konsumen yang bisa membeli 12 dan 50, tabung 50. Karena Bapak punya agen di daerah, di Bali, ada yang punya PSO, yang menyalurkan 3 kg, sekaligus juga menyalurkan yang komersil, jadi, jadi satu agen bisa melakukan itu, atau satu agen memiliki dua, jadi memiliki satu, boleh menyalurkan yang 3 kg, sekaligus juga punya agen, orang yang sama punya agen bisa menyalurkan yang 12 dan 50. Selanjutnya setelah agen 3,



gas 3 kg ini dioplos, juga diambil oleh agen, Pak, jadi. Oleh agen yang PSO, eh oleh agen yang komersial, jadi yang 12 dan 50 ini juga dijual oleh agen resmi.

Saya ingin bertanya dalam kesempatan ini, bisakah, adakah aturan di Pertamina atau pengawasan di Pertamina, yang bisa masuk bahwa, bisa membedakan agen gas tabung 12 kilo resmi yang diambil di SPBE dengan gas kilo 12, 50 yang hasil pengoplosan, ada *enggak* bedanya, bisa *enggak* dibedakan? Itu, iya.

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Izin menjawab, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya Ini karena penting ya, ini *urgent* saya persilakan.

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Baik.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Supaya *clear*, ini *kan* publik melihat kita.

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Baik.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dan tidak terjadi di Bali *aja*.

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Iya, terimakasih, Pak, izin menjawab, Pak Nyoman dan juga Pimpinan serta Bapak-Ibu sekalian. Jadi untuk aturannya, Pak, kalau agen itu tidak diizinkan atau tidak diperkenankan, ada dua jenis *product*, PSO dan non PSO yang digabung jadi satu, Pak. Tapi kalau di pangkalan, karena untuk memberikan kemudahan kepada konsumen ...

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Saya tidak mengatakan digabung, Pak, agen Bapak, orang yang sama.

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Oh.



F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Punya, punya yang, orang yang sama, perusahaan yang sama, atau PT yang dimiliki oleh orang yang sama, menyalurkan, menyalurkan gas 3 kg, juga sekaligus punya perusahaan yang menyalurkan itu, Bapak jangan bantah itu, karena itu memang sudah benar itu.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi yang punya sama, tapi PT-nya berbeda.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Jadi *anu*-nya berbeda.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Karena, karena *gini*, dulu peralihan dari gas, dari minyak tanah itu, beralih ke gas *gitu*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

3 kiloan.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

3 kiloan dan juga gas 12 dan 50 *kan gitu*, beralihnya

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi 2 PT, Pak, ini, pemilik sama 2 PT.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Iya 2 PT, orangnya sama 2 PT, mereka dulu *kan* banyak sekali punya minyak tanah, sehingga akhirnya satu orang bisa memiliki 12 DO, *gitu loh*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke cukup.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Lanjutnya, ada aturan terbaru, dipecah menjadi 6-6, menjadi 6-6, 6-6 ini ada yang agen yang 3 kilo, ada yang 12 dan 50. Pak, jangan bantah ini, memang begitu faktanya.



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Cukup, Pak, silahkan.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Itu jadi, yang saya ingin tanyakan adalah bukan mempersoalkan orangnya punya 3 kilo atau 12, 50, bukan itu. Bisakah Bapak bedakan, gas yang setelah dioplos, masuk ke 12 dan 50, dengan gas resmi yang keluar dari SPBE, yang sama-sama disalurkan oleh agen yang resmi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Itu yang saya ingin tanyakan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Membedakan produknya, Pak.

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Baik, Pak, terima kasih, mohon maaf.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

(berbicara tidak menggunakan mic)

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Cukup, Pak.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

(berbicara tidak menggunakan mic)

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Yang agen resmi juga, jadi izin Pak, tadi mohon maaf, kami salah memahami pertanyaannya, jadi kalau untuk membedakannya, sampai saat ini



memang membutuhkan *effort* khusus, Pak, untuk membedakan yang mana, yang memang keluar dari agen resmi dan juga yang mana yang merupakan oplosan.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Dipermudah, dipermudah agar masyarakat *ngerti*, Bapak punya enggak...

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.T., S.H., M.Si., M.M.):

Segel.

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Ada, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Segelnya itu *loh*, Pak.

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Ada segel.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Segel yang resmi dari SPBE, saya sudah cek.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kan segelnya ya mesti di palsu.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Tapi yang palsu yang bisa dibeli di, di, pasar *online*, untuk mengisi yang oplosan juga gampang banget.

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Betul, Pak, betul, Pak, betul, Pak.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Terus membedakannya *gimana*, membedakannya.

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Betul, Pak. Saat ini memang, saat, sangat sulit untuk membedakannya, Pak, Pak Nyoman, iya, iya



F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Enggak bisa membedakan, sederhananya begitu bahasa rakyatnya, jadi jangan *muter-muter*, Bapak *enggak* bisa bedakan antara 12 oplosan dengan yang 12 resmi, sehingga agen bisa menyalurkan dengan ... ya.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin, Pimpinan, izin, Pimpinan.

Satu *aja* menyangkut ini, izin Pimpinan, saya Pak. Saya mau nanya ini, apa namanya, ini nyala semua, itu pengawasannya dilakukan oleh Pertamina dalam hal ini Patra Niaga, atau BPH Migas, atau siapa *sih* sebenarnya yang harus melakukan itu secara, secara rutin *gitu*? Mohon dijawab dulu, Pak Dirut.

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Izin menjawab, Pak, terima kasih.

Jadi pengawasannya memang kita melakukan melalui mekanisme verifikasi volume secara rutin, Pak, bersama-sama dengan Dirjen, Dirjen Migas, Pak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Pertamina berarti melakukan?

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Pertamina, Pertamina, Pertamina Patra Niaga dalam hal ini, bersama-sama dengan Dirjen Migas melakukan verifikasi volume secara regular, secara bulanan, untuk melihat kesesuaian.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Oke, kalau Dirjen Migas berarti, Dirjen Migas ya, berarti di daerah sendiri, kabupaten, kota, itu *enggak* ada kewenangan atau apapun untuk memantau atau mengawasi itu?

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Untuk pemda, memang tidak memiliki kewe, bukan tidak memiliki, Pak, tapi untuk melakukan pengawasannya, kami melakukannya berdasarkan aturan dan bersama-sama dengan Dirjen Migas, tapi juga melibatkan pemda, pemerintah daerah.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ya artinya, dalam regulasi, tidak ada kewajiban atau kewenangan dari pemerintah setempat, untuk secara rutin melakukan pemantauan, *kan gitu nih* ya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, teman-teman nanti kita dalam lagi, kita minta ada kunjungan spesifik, khusus terkait dengan fungsi pengawasan kita terhadap hal-hal yang menyangkut masalah distribusi, juga pengamanan, program subsidi gas LPG 3 kiloan.

WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dikit, 1 menit.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ketua, ini *kan* zaman canggih ya, Pak, ya, *emang enggak* bisa *digital* langsung ketahuan, Pak, begitu itunya berkurang, volumenya berkurang? *Engga, enggak* harus ditimbang satu-satu, orang *nimbang* koper *aja* sekarang ketahuan *kok*, Pak.

DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (RIVA SIAHAAN):

Izin, Pak Ket, Pimpinan.

Saat ini, memang proses digitalisasi dan juga pencatatan pembelian, itu saat ini masih di pembelinya, Pak, di NIK-nya. Jadi saat ini sudah 100%, ada 42 juta NIK, yang memang sudah tercatat di sistem.

WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bukan, bukan penerimanya, Pak, jadi ditabungnya *kan* bisa, Pak, dibikin alat.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Belum, belum ada.

WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh, ya kalau itu mahal pengadaannya, yang subsidi, yang, apa namanya, terbuang karena dioplos itu berapa harganya, *kan* tinggal dibandingkan *gitu* saja.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ini perlu pendalaman khusus kawan-kawan, nanti untuk khusus, terkait pengawasan kita untuk LPG 3 kiloan, nanti kita adakan RDP, kalau perlu U

tambah U, dengan beberapa agen dan beberapa *stakeholder* yang perlu kita dalam secara bersama-sama. Lanjut, Pak Dirut.

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Baik, Pak, untuk hal operasional tadi, kami memberikan perhatian khusus tentang distribusi LPG, Pak, masukan-masukan sangat berharga.

Selanjutnya mungkin terkait aspek finansial, mohon Bu Emma dapat memberikan jawaban singkat atas beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota.

Terima kasih.

DIREKTUR KEUANGAN PERTAMINA (EMMA SRI MARTINI):

Baik, izin melanjutkan, barangkali tadi ada beberapa pertanyaan mungkin tadi terkait BOPO dari Pak Harris dan Pak Husni, barangkali ya tadi terkait BOPO. Betul sekali, Pak, jadi mungkin izin menyampaikan bahwa Pertamina itu dalam sejarahnya, biasanya di *level* 94-95% Pak, nah, kalau kita lihat dari rasio BOPO itu kan biaya *versus* pendapatannya, Pak, ya. Pendapatan Pertamina di Tahun 2022 itu di 84 miliar US *Dollar*, 84 miliar US *Dollar* itu kalau diekuivalenkan, di 1350 triliun, jadi kalau kita menurunkan rasio BOPO 1% saja, itu kita harus menurunkan biaya 135 triliun, kurang lebih, kalau 10% ya Pak ya. Nah, kalau 1%-nya 13 triliun. Nah, kita sudah berhasil menurunkan 5%, berarti kurang lebih *udah* hampir 67-70 triliun kita sudah berhasil menurunkan, nah, itu yang *effort* kita yang sudah kita lakukan *tuh*, Pak, 94 ke 89.

Nah kalau kita *benchmark* lagi dengan NOC, IOC, mereka berada di kisaran 40 sampai 70%. Namun kita lihat catatannya bahwa mereka tidak *comparable* dengan kita, kenapa? Karena mereka asetnya *kan* muda-muda, Pak, mereka asetnya tidak seperti kilang-kilang kita yang sudah usia 50 tahun, yang *udah* *maintenance cost*-nya kita tiap tahun *spend* 1,5 sampai 2 miliar US *Dollar* untuk untuk *maintenance*. Tadi yang disampaikan, aset *integrity* HSSE, ya kita *spend* tuh 1,5 miliar sampai dengan 2 miliar, untuk *repair* pipa-pipa yang sudah tua, kilang-kilang yang sudah tua, ada, malah di, diafirmatikan, harus di-*spend*, kalau, kalau *enggak*, kilang-kilang kita *beledak-beleduk* *kan* itu, seperti itu tadi. Jadi *malah* kita harus *spend* masing-masing *Subholding*, ada yang 300 juta US, 400 juta US, itu harus dibelanjakan tiap tahun, untuk me-*maintain* kualitas layanan dan aspek *safety* itu tadi, Pak, itu satu, jadi tidak *comparable*. Apalagi dengan *banking*, *banking* itu *kan* lebih *relatively asset light* ya Pak ya, tidak ada *maintenance asset* yang ...

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.T., S.H., M.Si., M.M.):

Ndak, ndak, Bank saya *ndak* membandingkan dengan *banking*, yang saya bandingkan adalah dengan NOC lain.

DIREKTUR KEUANGAN PERTAMINA (EMMA SRI MARTINI):

Betul.



F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.T., S.H., M.Si., M.M.):

Ya.

DIREKTUR KEUANGAN PERTAMINA (EMMA SRI MARTINI):

Betul.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.T., S.H., M.Si., M.M.):

Dengan *banking*, tadinya, contohnya seperti ini, ketika BTN dengan bangga, menurunkan dari 87 menjadi 83, itu sudah bangga sekali. Tetapi dengan bank lain, ternyata BCA 44, *gitu loh*, Bu.

DIREKTUR KEUANGAN PERTAMINA (EMMA SRI MARTINI):

Betul, iya. Iya kalau di kita, NOC kisarannya yang relatif *tuh* 70%, 70% *tuh* kita dari, dari 89 ditarik ke 70, itu pasti luar biasa *effort*-nya, untuk kelas Pertamina dengan aset yang notabene tua-tua ya, tadi, 1% menurunkan BOPO, itu kita harus menurunkan tadi, kurang lebih 67% kita harus melakukan efisiensi. Tadi kita 5% dari 94% BOPO ke 89 aja, sudah 67% kita lakukan penghematan.

Dan itu, itu rasanya, kalau kami melihat perjalanannya, dari tahun 2020 hingga 2023 kemarin, tadi meng-*address* yang ditanyakan oleh Pak Khilmi, kami menjalaninya, proses restrukturisasi *Holding-Subholding*, itu kami *witness* sendiri, Pak, itu adalah suatu keberhasilan restrukturisasi organisasi di kami, Pak. Dulu waktu kita masih bentuknya *Holding*, itu biaya itu *dibuntel*, Pak, tidak ada transparansi dari *cost structure*. Sekarang kita sudah di *slicing* menjadi *Subholding*, sehingga *cost* itu menjadi transparan, kita bisa melihat efisiensi di masing-masing *Subholding*. *Cost structure* itu bisa di-*benchmark* dengan *industry* sejenis gitu, di *peer industry*-nya. Kalau dulu, waktu itu, hilir itu di, disatukan tuh, *cost structure*-nya, antara Kilang, *shipping*, dengan *commercial and trading*, dengan distribusinya. Kalau sekarang, Kilang sendiri, *shipping* sendiri, *commercial and trading* sendiri, sehingga kita bisa lihat efisiensi dan *benchmark* di masing-masing *industry*-nya, itu yang menyebabkan efisiensi itu bisa terjadi, dalam perjalanannya bisa turun *tuh*, Pak, 94% ke 89 itu.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Ketua, Ketua.

Ini *kan* menjawab pertanyaan saya, Ketua. Sebentar, Ketua, ya?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya mengakhiri jam 2.



F-P.GERINDRA (KHILMI):

Iya sebentar *aja*.

Bu, tapi di tiap *Subholding* ini *kan*, cari keuntungan sendiri-sendiri Bu, ya ini *kan*, bahayanya *kan* di sini, antara *Subholding* satu, dengan *Subholding* yang lain, ini *kan*, mungkin ya, ada yang diuntungkan ada yang di rugikan yah. Ini yang harus dihitung *gitu loh*. Saya *kan* di sini pas, rapat di sini antara PIS dengan yang lain ini, berbenturan *gitu loh*. Ini ongkosnya kalau dibandingkan dengan ibu menyewa di tempat lain, misalnya, itu *kan* jauh. Masalahnya ini *kan* PSO, harus *ngambil* di *Subholding* ini, *kan gitu?* Lah itu yang harus dihitung. Jadi jangan sampai yang di sini untung, yang sini, jadi bagaimana penghematan ini, HPP Pertamina itu bisa, hemat *gitu loh*. Ini *kan*, kalau ini, mau *nyari* untung *gede* misalnya PHE.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Nyari untung *gede*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Substansinya ditangkap. Pak.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Ini *gede*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Substansinya ditangkap, Pak.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Ya itu, yang, yang, yang, yang harus dihitung, *gitu loh*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, Bu.

DIREKTUR KEUANGAN PERTAMINA (EMMA SRI MARTINI):

Betul sekali, Pak, itu sudah dipastikan dihitung, Pak, karena kita memastikan di *Holding* sudah diberlakukan transfer *pricing*, antar *Subholding* itu sudah pasti diberlakukan transfer *pricing*, karena itu salah satu yang diaudit oleh kantor audit juga Pak, bahwa itu harus *arm's length*, tidak boleh ada tadi, salah satu yang dirugikan dan *benchmark pricing*-nya harus



comparable terhadap *market*. Jadi itu yang dipastikan, itu dipastikan. Oleh karena itu, kalau dilihat dari setoran kita kepada negara, kepada pajak, itu semuanya meningkat, tidak ada yang dirugikan, dari kinerja masing-masing *Subholding*, itu yang, yang, yang kita lihat dari kinerja masing-masing *Subholding*, Pak.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Coba Ibu bayangin ya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Cukup, cukup, cukup, Pak, cukup, Bu.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Perusahaan di, Malaysia sama di tempatnya Ibu, itu *aja*, jadi *kan* di sana. (*berbicara tidak menggunakan mic*) Bisa murah, di sini harganya tinggi, jadi itu *aja*, jadi diitung yang *bener gitu*, maksud saya, masalahnya jangan sampai ada yang rugi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, *oke, oke*, Pak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Saya pertanyaan satu buat Bu Emma *aja*, Bu Emma baru pulang dari Korea atau *gimana*, saya agak *pangling* nih sama teman saya di sebelah ini.

F-PD(MUSLIM, S.HI., M.M.):

Iya, iya.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Makasih, lanjut.

DIREKTUR KEUANGAN PERTAMINA (EMMA SRI MARTINI):

Pak, *pengennya sih* baru pulang, Pak, cuman belum ke Korea, Pak, belum.

ANGGOTA KOMISI VI DPR RI:

Bisa di,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Masih ada, Pak Dirut?



DIREKTUR KEUANGAN PERTAMINA (EMMA SRI MARTINI):

Ya.

ANGGOTA KOMISI VI DPR RI:

Bisa ditanya setelah rapat *tuh*.

DIREKTUR KEUANGAN PERTAMINA (EMMA SRI MARTINI):

Saya izin menjawab Pak Muslim, satu lagi barangkali, tadi terkait dengan KEK, Pak Muslim izin menyampaikan *update*-nya. Jadi tadinya harusnya selesai di Desember, Pak, kajiannya, namun ada sedikit masalah di Danareksa waktu itu, jadi kajiannya baru *final*, mungkin Nanti Pak Oko menyampaikan *detail update*-nya, baru akan selesai di Juni, akan dibawa presentasi dengan Kementerian BUMN. Harusnya di Juni-Juli ini katanya, sudah masuk di RKAP 2024 untuk, untuk investasi PMN-nya, mungkin itu *update*-nya, *makasih*.

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silahkan, masih ada?

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Ada hal-hal yang tadi mencuat di diskusi terakhir, kami akan memberikan data-data *benchmarking*, Pak, ya, secara faktual, secara *apple to apple*, termasuk tadi ada pertanyaan mengenai *R2P*, *Triple R*, dan barusan Pak Khilmi juga harga *product* ya, kami akan berikan di jawaban tertulis *benchmarking* yang, yang faktual dan *apple to apple*, Pak, supaya cara melihatnya jadi sama.

Saya kira itu, Pak, jawaban sementara, nanti tertulis kami akan jawab detail atas masukan-masukan dari Bapak-bapak dan Ibu sekalian.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bapak-Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia,

Saya ucapkan terima kasih, kepada jajaran Direksi Pertamina yang telah memberikan respons, atas pertanyaan, tanggapan dari kawan-kawan sekalian.

Saya akan membacakan kesimpulan rapat pada hari ini, Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina, terkait Evaluasi Kinerja



Korporasi Tahun 2023, Rabu 12 Juni 2024. Kesimpulan rapat atau draf ini atas masukan dari kawan-kawan dan rangkuman dari pembicaraan kita hari ini, yang nantinya beberapa, kita juga akan bawa di dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, selaku pembina BUMN.

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja operasional dan keuangan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2023, yang berhasil tumbuh di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang berfluktuasi, serta mendorong PT Pertamina untuk senantiasa meningkatkan kinerja pada periode-periode sebelumnya. Periode-periode, kinerja di masa depan ya, ini dukungan *supporting* politik kita ke Pertamina.

(RAPAT: SETUJU)

2. Kemudian Komisi VI mendorong PT Pertamina beserta seluruh *Subholding* untuk memastikan ketersediaan, ini, Pak, penting sekali, satu kata tapi, cara pandangya harus *think global* dengan berbagai variabel yang saat ini maupun yang akan terjadi, memastikan ketersediaan, distribusi, serta keterjangkauan harga bahan bakar minyak, BBM, dan gas alam, dalam rangka mendukung ketahanan energi Nasional, tidak pesimis, ada *skeptivisme* dengan perubahan-perubahan yang terjadi di global, di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang berfluktuasi.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Energi nasional.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh energi nasional ya, tambah energi nasional?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Energi nasional, di tengah situasi, itu buang *aja*.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Redundant.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Energi nasional *thok?*

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Titik.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Titik?



Saya kira tekanannya karena, kalau dalam keadaan normal kita tidak terlalu khawatir, tapi justru situasi yang bisa abnormal itu di tengah, apa gantinya.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Mungkin, Mas, karena di atas, poin 1 kan sudah disebut, bahwa kita ini ada dalam konteks situasi...

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Geopolitik dan ini kalau diulang terus lagi *kan*,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Redundant kalau menurut saya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ketahanan energi.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ketahanan energi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nasional ya.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Nasional titik, sudah itu *aja*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Hilangkan, karena penekanan situasi geopolitik dan ekonomi global, itu sudah disebutkan.

(RAPAT:SETUJU)



3. Dari dua hal keputusan di atas, Komisi VI DPR RI meminta Pertamina, beserta seluruh *Subholding* untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memperketat pengawasan koordinasi dengan pihak terkait aparat penegak hukum, serta melakukan langkah pencegahan yang efektif, dalam rangka meminimalisasi, penyalahgunaan distribusi gas bersubsidi di seluruh Indonesia, serta memberikan sanksi bagi distributor yang melanggar ketentuan pendistribusian.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Sebutan Pertaminanya apa, Pak? Sebutan Pertaminanya, jadi ada SPBE, ada agen, ada pangkalan, apa istilahnya, *kan* tidak distributor, istilahnya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh iya.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Agen dan distributor ya?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Agen,

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Distributor dan agen?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Agen, agen, agen SPB,

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

SPBE dulu.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

E.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

SPBE dulu.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh SPBE, agen.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Agen pangkalan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dan pangkalan ya, SPBE, agen, dan pangkalan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Bisa saya kasih masukan sedikit, Pimpinan?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Yang pertama, bukan memperketat tapi meningkatkan pengawasan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Meningkatkan?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Meningkatkan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Meningkatkan pengawasan, dengan berkoordinasi,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pengawasan dengan berkoordinasi?

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.T., S.H., M.Si., M.M.):

Pihak, bersama, bukan, meningkatkan pengawasan, atau dan berkoordinasi dengan, dan berkoordinasi dengan,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pihak-pihak,

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Pihak berwenang, *gitu aja*.



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pihak berwenang.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Atau pihak terkait, *enggak* perlu aparat penegak hukum segala.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pihak-pihak berwenang.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pihak ber...

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Dengan pihak-pihak yang berwenang.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dengan pihak berwenang ...

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Atau pihak-pihak terkait bisa.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dengan pihak-pihak yang berwenang, serta melakukan langkah pencegahan, yang efektif ...

WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Untuk, dalam rangka, buang, untuk ...

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Yang efektif untuk meminimalisir, meminimalisir penyalahgunaan distribusi gas bersubsidi di seluruh Indonesia, serta memberikan sanksi bagi SPBE, agen, pangkalan, yang melanggar ketentuan pendistribusian.

Pak Wadirut, *oke?*



(RAPAT:SETUJU)

- b. mengevaluasi sistem distribusi bahan bakar minyak dan gas bersubsidi, termasuk optimalisasi digitalisasi, sehingga proses distribusi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Mengoptimalkan, bukan mengoptimalisasi termasuk mengoptimalkan proses.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Dirut, bahasa cukup operasional *enggak* ini? Kita *enggak* ingin bikin kesimpulan yang di atas *awang-awang*, Pak, ya *kan*.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Oke lah itu, bagus.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bagus ya, mengevaluasi sistem distribusi bahan bakar minyak dan gas bersubsidi, termasuk mengoptimalkan digitalisasi sehingga proses distribusi dapat dilakukan secara tepat.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Mungkin “dengan” *tuh*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sasaran.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

“Termasuknya” diganti “dengan”, bukan termasuk, dengan mengoptimalkan digitalisasi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya diganti “dengan”. Iya.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian,

- c. memperluas kota bahan bakar minyak dan gas bersubsidi terutama di wilayah, ini tadi ada masukan penting, Pak, tertinggal, terdepan, dan terluar, untuk meningkatkan akses



energi masyarakat, Pak, apa ada divisi khusus, Pak, ya, Pak Dirut, untuk 3T ini Pak?

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Ya, mungkin izin klarifikasi terlebih dahulu, Pimpinan, yang dimaksud ini memperluas kuota atau distribusi atas kuota yang diberikan oleh pemerintah?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Distribusi, Pak.

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Akan berbeda soalnya, Pak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ada juga yang belum masuk kuota, padahal seharusnya masuk.

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Namun kewenangannya tetap bersama pemerintah.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kewenangannya di man.a Pak?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Kalimatnya mungkin ditambah, “memperjuangkan”, bisa ditambah *kan?*

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tapi kewenangan tidak di operator ya, Pak, ya, di regulator, Pak, ya ?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya memperjuangkan *aja* lah, ya karena ini operator.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

“Tambahan kuota atau daerah konversi baru”

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

“Memperjuangkan”, itu betul, Pak, NTT itu belum ada konversi, sebagian?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Labuan Bajo ...

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Dirut?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

... *aja enggak*, itu.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

NTT sudah semua? Oh Maluku, minyak tanahnya ya dikirim itu? *Oke*, memperjuangkan,

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Tempat saya belum *loh*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Memperjuangkan ...

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Belum *dong*, di tempat saya ada banyak sekali daerah yang tidak masuk wilayah konversi, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bapak laporkan ke kita lah, Pak, 3T yang kira-kira belum, supaya kita lintas fraksi bisa memperjuangkan di, di Komisi VII atau di Komisi Anggaran. "memperjuangkan kuota bahan bakar minyak dan gas bersubsidi terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, untuk meningkatkan akses energi masyarakat", masuk akal Pak ya, *scope*-nya ya, kewenangannya ya, hanya memperjuangkan, karena sebagai operator.

(RAPAT:SETUJU)

- d. menyusun strategi, mitigasi risiko, dalam rangka mengantisipasi, ini, Pak, mitigasi risiko dalam rangka mengantisipasi fluktuasi harga minyak dunia yang dapat berpengaruh pada harga, bahan bakar minyak dan gas, serta kinerja perusahaan.

Ini penting sekali, Pak, yang tadi kita singgung-singgung global, nasional, regional, yang tidak hanya dalam skala nasional kita, juga dari berbagai negara *oke ya? Oke*.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

- e. menyampaikan kajian secara detail atas *cost and benefit* meliputi infrastruktur, kesiapan masyarakat, dampak sosial, dan analisa kebutuhan konsumen, sehubungan dengan rencana penggantian Peralite dengan Pertamina *Green 92*.

Tadi siapa ya yang Pertamina, ah Pak Amin, apa terlalu berlebihan ini, *anunya?*

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Izin, Pimpinan, ini ...

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kesimpulannya, silahkan, Pak.

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Kewenangannya lebih di pemerintah, Pak, dari pada kita.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kewenangan di pemerintah? Tapi untuk infrastruktur kesiapan ini *gimana*, Pak?

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Termasuk bagian dari kajian itu ada di pemerintah, Pak. Termasuk kajian itu ada di pemerintah, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kajian di pemerintah?

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Ya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kalo sudah d kaji, apa yang disiapkan, *kan* kadang mendadak di SPBE itu, *enggak* ada?

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Kami belum ada tugas untuk itu, Pak.



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Belum ada ya, *oke* ini dihilangkan atau dicatatkan?

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Dihilangkan, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Hilangkan dulu?

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Hilangkan, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, hilangkan dulu untuk, Pak Amin hilangkan dulu? Catatan *aja* ya.

F-PKS (AMIN, Ak., M.M.):

Iya catatan *aja*, berarti tugasnya pemerintah, Pak, ya, bukan di...

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, jadi kalau ada apa-apa mendadak, ini masyarakat biar tahu ini, ini lebih pada pemerintah atau regulator.

Sampai mana tadi? E dulu ya? Melaksanakan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* serta secara konsisten. Ini transparasi, akuntabel yang ...

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ini *kan* dah kewajiban, Mas, kalau perlu ditaruh, ini ditaruh mungkin *aja* untuk, apa namanya, memastikan atau meningkatkan itu *good* ...

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Governancenya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Meningkatkanlah, ini penting, Pak, juga belanja-belanja, yang bisa belanja lokal, lokal, Pak, untuk mengurangi ini BUMN-BUMN banyak justru,



belanja peningkatan impor ini begitu tinggi, maka Komisi VI berkomitmen untuk bagaimana belanja BUMN ini, lebih mengutamakan barang-barang dalam negeri, walaupun kalau Pak Presiden *ngomong*, mahal-mahal *dikit enggak* apa-apa ya, saya kira itu.

(RAPAT: SETUJU)

- f. melaksanakan transformasi bisnis secara berkelanjutan, melalui pelaksanaan aksi korporasi yang tepat, produktif, dan efektif, serta melaksanakan efisiensi, usaha dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, sekaligus kontribusi perusahaan bagi negara.

Normatif ya?

(RAPAT: SETUJU)

Oke, lanjut, masih ada.

4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Pertamina (Persero) beserta seluruh *Subholding*, untuk memberikan jawaban tertulis, dalam waktu yang, yang paling lambat, dalam waktu paling lama 5 hari atas kerja, hari, atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI.

(RAPAT: SETUJU)

F-PKS (AMIN, Ak., M.M.):

Pimpinan.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Pimpinan, sedikit.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Monggo.

F-PKS (AMIN, Ak., M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya.

F-PKS (AMIN, Ak., M.M.):

Saya dulu.



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Amin

F-PKS (AMIN, Ak., M.M.):

Ya saya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Satu menit, 1 menit, 1 menit dah ya.

F-PKS (AMIN, Ak., M.M.):

Saya kepikiran dalam rangka mendukung BUMN khususnya Pertamina, ini, Pak. Biaya kompensasi itu *gimana* Komisi VI memberikan dukungan agar bisa diganti oleh pemerintah itu per semester, nah ini bisa *enggak* disimpulkan dalam rapat, karena *kan* pernah terjadi 2 tahun, Bu Emma, ya?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dibayar terlambat saja untung ini.

F-PKS (AMIN, Ak., M.M.):

Hah, tentu ini harus siap, per semester laporan siap, ada audit intern,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dibayar terlambat.

F-PKS (AMIN, Ak., M.M.):

Diganti, karena ini *kan*, ekuitas, tinggi, bagus, duit ada *enggak*, dan tentu ini sangat mengganggu likuiditas dan sangat mengganggu aksi, rencana aksi-aksi korporasi, saya kira bisa jumlahnya kadang-kadang ratusan triliun kalau 2 tahun.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bahan catatan.

F-PKS (AMIN, Ak., M.M.):

Ya kira-kira itu.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Untuk rapat kerja.



F-PKS (AMIN, Ak., M.M.):

Masukan saya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dengan Menteri BUMN.

F-PKS (AMIN, Ak., M.M.):

Ya terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Penting itu, Pak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Nanti *enggak* berani juga mereka *nyampein* ke Menkeu, sama *aja*.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya kalau dia *nyampein* di sini,

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Siap, Pimpinan, sedikit.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Temannya Bu Dirut Keuangan alarmnya muncul, silakan.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Tambah sedikit, Pak Ketua, ini khusus Pak Riva ini, karena ini juga, teman-teman di Aceh ini *kan* mendengar RDP hari ini berkaitan dengan BBM industri yang ada di Sabang. Itu mungkin nanti silakan, Pak Riva, tidak harus dijawab sekarang, tapi saya berharap ini menjadi masukan. Dan kita harapkan bisa dituntaskan antara Sabang dan Batam ini saya pikir harus ada satu kesetaraan lah ya, jangan perbandingan yang hampir 100% itu, Pak Ketua, *makasih*.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Saya bisa ...

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih.



Sebagaimana lazimnya sebelum dapat ditutup, setelah kesimpulan tadi kita ...

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Pak Bimo.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sepakati bersama,

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Izin, Pak Bimo, untuk memastikan Pak Wakil Dirut *Holding* dan Dirut Patra Jasa datang mengirim tim Satgas ke Bali.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Urusan pengoplosan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nanti di-*closing* , kami persilakan ditambahkan.

Sebelum ditutup, kami akan mempersilakan kepada Pak Wadirut untuk menyampaikan *closing statement* sekaligus tambahan respon, mungkin yang belum disampaikan.

WAKIL DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (WIKO MIGANTORO):

Waktu ini kami pergunakan untuk mengucapkan sekali lagi terima kasih atas dukungannya dan semangatnya kepada kami untuk terus menjalankan perusahaan agar tetap *survive* dan tumbuh. Tujuannya tentu saja untuk ketahanan energi nasional. Tentu saja untuk masalah operasional, kami sangat menghargai masukan-masukan dari Bapak-bapak sebagai komitmen, ke Pak Nyoman khususnya, di Bali kami akan segera ke sana, Pak, bersama-sama melihat data yang Bapak infokan tadi, ada 21.

Saya kira itu tambahannya, Ketua, Pimpinan

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya untuk Bali segera ke sana, karena juga empati kita terhadap korban, Pak.

Saya kira itu, Bapak-Ibu dan hadirin yang saya muliakan,



Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Wadirut PT Pertamina beserta Direksi *Holding* dan CEO *Subholding*, serta atas nama Pimpinan Komisi VI kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan Anggota Komisi VI yang telah mengikuti acara rapat dengar pendapat pada hari ini sampai pukul 14.20 menit.

Dengan demikian, rapat kami tutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.10 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001